



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN  
KEPALA BIG (BADAN INFORMASI GEOSPASIAL) DAN  
KEPALA BAPETEN (BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR)**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 13.16 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara  
1, Jakarta  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto, (F-Nasdem/Ketua Komisi VII  
DPR RI).  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Progres pelaksanaan kegiatan TA 2023,  
2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP tahun 2024,  
3. Penetapan RKA-K/L dan RKP tahun 2024.  
Hadir : 11 orang Anggota hadir dari 50 orang Anggota  
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

- 2 orang anggota dari 10 anggota:  
1. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.  
2. Bambang DH.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

- 2 orang anggota dari 7 anggota:  
1. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.  
2. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

- 0 orang anggota dari 5 anggota:

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

- 1 orang anggota dari 4 anggota:  
1. Rico Sia.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

- 1 orang anggota dari 5 anggota:  
1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

- 1 orang anggota dari 5 anggota:  
1. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

- 2 orang anggota dari 5 anggota:  
1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.  
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

- 0 orang anggota dari 3 anggota:

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

- 0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Sugeng Sumbarjo (Kepala BAPETEN)  
2. Muh. Aris Marfai (Kepala BIG)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baiklah Bapak/Ibu sekalian, mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala-Kepala BAPETEN dan Kepala BIG atau Badan Informasi Geospasial, ya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera kami sampaikan.

*Om Swastiastu.*

*Namo Budhaya.*

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, ini masih *on the way* beberapa Pimpinan akan juga segera hadir;

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, dan juga;

Yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) beserta jajarannya;

Yang juga kami hormati Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan beserta jajarannya.

Pertama-tama pasti kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa bahwa kita dikarunia nikmat sehat *wal-afiat*, tapi ternyata Bapak/Ibu sekalian Covid itu masih ada, saya orang rumah, apa asisten rumah kena ini ada 2 orang jadi kita tetap hati-hati, tapi sekali lagi kita semuanya bersyukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dikarunia nikmat sehat *wal-afiat* sehingga kita dapat menyelenggarakan rapat pada hari ini dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab konstitusional kita masing-masing.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu sekalian dan juga Anggota Komisi VII yang hadir untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan sesuai undangan yang disampaikan dan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BAPETEN dan juga Kepala BIG dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran. Sebagaimana Bapak/Ibu ketahui ini hari-hari ini memang kita sedang merumuskan anggaran khususnya nanti kita akan memastikan pagu indikatif yang *insyaallah* nanti akan titik temu antara DPR dan juga pemerintah dan menjadi APBN nantinya.

Agenda hari ini adalah pertama *progress* pelaksanaan kegiatan tahun anggaran tahun 2023, dan kedua pembahasan RKA-K/L dan RKP tahun 2024, ketiga sekaligus nanti penetapan RKA-K/L dan RKP tahun 2024.

Bapak/Ibu sekalian berdasarkan data sekretariat, Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 10 anggota terdiri dari 7 fraksi dari 9 fraksi, dengan

demikian Kuorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan masih, dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak/Ibu sekalian?

Baiklah, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu sekalian bahwa rapat ini akan selesai kurang lebih 2 jam sejak dimulainya rapat ini atau kurang lebih pukul 13.00 WIB, dan apabila dinyatakan perlu untuk diperpanjang maka bisa diperpanjang, setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024, maka pada kesempatan ini disampaikan usulan pagu indikatif belanja BAPETEN dan BIG pada RAPBN tahun 2024 masing-masing sebagaimana.

Baiklah, sebelum kita membahas atau masuk pagu indikatif tahun 2024 kami persilakan dari Kepala BAPETEN untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan tahun 2023 dengan APBN yang ditetapkan tahun 2023 yang lalu, dipersilakan Kepala BAPETEN.

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Terima kasih yang Mulia Pimpinan Komisi VII,

Anggota yang saya hormati.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera.

Kami melaporkan realisasi anggaran BAPETEN tahun 2023 di mana BAPETEN mendapatkan pagu awal itu sebesar 124,3 miliar rupiah, kemudian diadakan blokir atau *automatic accusement* sebesar 8,129 miliar, sehingga pagu setelah blokir itu ada 116 miliar. Dari 116 miliar kami sudah merealisasikan sebesar 48,6 miliar atau sebesar 41,82%. Ini realisasi pada status pada hari ini, kemarin maksud kami, kemarin akhir Bulan Mei itu melebihi 1% dari target yang kami rencanakan 40,28%.



Selanjutnya target kegiatan yang sudah kami lakukan untuk perizinan itu meliputi perizinan **penempatan** tenaga nuklir, perizinan untuk kesehatan dan industri, perizinan untuk petugas **kualitas** dan juga bahan nuklir, juga untuk sertifikasi keandalan peralatan dan sebagainya, itu dari target 6.400 kami sudah melampaui **bapak ibu sekalian** 6.920 (**suara tidak jelas 00.06.58**), tapi masih ada beberapa modul yang perlu sekarang saat ini sedang progres pelaksanaannya.

Kemudian untuk kegiatan inspeksi, untuk inspeksi keselamatan dan keamanan petugas kesehatan juga industri untuk keselamatan nuklir dan juga untuk evaluasi keselamatan lingkungan dan radioaktif, demikian juga untuk pengawasan dosis pekerja reasi, radioaktif dan lingkungan, kami menargetkan ada 451 LHI dan 9 LHE, saat ini sudah terealisasi sebesar 146 LHI.

Kemudian untuk kegiatan sistem pengawasan partisipatif, di mana kegiatannya adalah tersedianya modul-modul teknis aplikasi, kemudian juga ada peningkatan SDM para *stakeholder*, juga adanya laporan dari penilaian mandiri oleh fasilitas itu saat ini sedang berjalan, sedang kami lakukan biasanya akan kami mulai pada semester kedua, penilaian itu dilakukan sekitar Bulan Juni atau Juli kami lakukan.

Kemudian untuk sistem peningkatan keamanan pengawasan nuklir, kami tahun ini hanya memasang dari anggaran hanya mendapatkan anggaran 3,72M itu kami gunakan untuk memasang satu unit FDFS, jadi tambahan alat *monitoring* sistem radiasi itu hanya 1 unit, kemudian ada pemeliharaan untuk 12 unit, jadi saat ini sedang kami siapkan dan juga kami mempersiapkan dalam rangka untuk KTT ASEAN juga sudah berjalan dengan baik.

Untuk pengembangan sistem pengawasan kegiatan pengembangan sistem pengawasan PLTN, itu kami sedang menyusun kerangka kebijakan estesi PLTN atau KL dan juga kami sudah juga menyusun naskah urgensi untuk penyesuaian standar (**suara tidak jelas 00.09.19**) untuk *small modular reactor*, dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapenas, ESDM, juga dengan DEN, dan juga sudah memasukan target-target untuk RPJMN, RPJMP, PN (Rencana Jangka Panjang Nasional). *Output*-nya kami harapkan nanti bisa kita gunakan untuk acuan kegiatan pada tahun 2024.

Kemudian untuk kegiatan perumusan peraturan, itu juga sudah berjalan dengan, saat ini masih berjalan, sedang kami susun, kebanyakan adalah konsultasi publik, dalam tahap konsultasi publik itu penyusunan *draft* Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran yang sampai saat ini sudah memasuki pembahasan di Kemenkumham.

Kemudian kami juga melaksanakan (**suara tidak jelas 00.10.19**) pengawasan dengan Bapak/Ibu Anggota DPR Komisi VII terutama, dari alokasi kami untuk tahun ini mengalokasikan 11 lokasi dan yang sudah terkonfirmasi, sudah terkonfirmasi ada 11 kami sesuaikan dengan jadwal Bapak/Ibu sekalian untuk pelaksanaannya, *insyaallah* tahun ini kita bisa laksanakan dengan baik di seluruh, yang terjadwal di seluruh Indonesia. Jika ada hal memang yang perlu, perlu ditambahkan untuk tahun 2023 kami siap menyesuaikan alokasi yang ada di kami. Demikian untuk tahun 2023.

Sedangkan untuk pagu anggaran, jadi ini pagu indikatif BAPETEN Tahun Anggaran 2024, dari tahun 2023 kami mendapatkan 124,3 itu di tahun 2024 mendapat 126,78 miliar atau naik sekitar 2,4 miliar. Kenaikan ini semoga di tahun 2024 tidak ada pemotongan lagi, tidak ada blokir sehingga 126 itu kita bisa gunakan optimal, jadi banyak kegiatan kalau kita lihat bahwa Yang Mulia Anggota Komisi VII, kalau kita lihat dari 5 tahun target kita itu sama sekali kami jauh dari target yang rencana 5 tahun, jadi kami hanya bisa menyelesaikan sekitar 20% dari target yang kami rencanakan selama 5 tahun karena memang anggarannya juga terbatas, dan kondisi pandemi juga membatasi kegiatan ini. Namun kami harapkan di tahun 2024 kita bisa memperbaiki mengejar ketinggalan dari target yang sudah kita tentukan selama 5 tahun sebelumnya.

Dari pagu indikatif ini kami gunakan untuk mendukung 2 program, jadi hampir mirip dengan 2023, program dukungan manajemen itu sebesar 101,367 miliar, kemudian untuk program riset dan inovasi sebesar 25,4 miliar, ini setelah kami diskusikan dengan hasil *general meeting* di sana. Nah dari sini itu untuk belanja operasional dukungan manajemen itu hampir mengalokasikan sampai 70%, 70% kami gunakan untuk kegiatan gaji dan belanja operasional, jadi praktis kami hanya dari 126 itu hanya untuk program riset dan inovasi hanya 25M yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Bapenas.

Struktur dari 126 pagu indikatif itu adalah kita menerima juga dari PNPB itu 11,2 miliar, kemudian dari rupiah murni itu ada untuk operasional 88 dan 27 miliar. Adapun target dan kegiatan yang kami rencanakan di 2024 yaitu untuk perizinan itu sebesar 8,39 miliar, kegiatan utamanya adalah untuk pelaksanaan perizinan, pemanfaatan tenaga nuklir, kemudian untuk petugas radiasi, sertifikasi personil, verifikasi untuk lab dan uji, dan juga untuk pengembangan modul informasi pengujian elektronik.

Kami alokasikan sebesar 8,39M. Kemudian untuk kegiatan inspeksi dengan kegiatan yang hampir mirip dengan 2023, kami alokasikan dari target dari 456 LHI kami naikkan menjadi 773 hasil inspeksi sebesar 6,39 miliar, itu karena memang banyak, selama pandemi itu kami tidak sempat menurunkan target perjalanan inspeksinya maka untuk tahun 2024 kami akan tingkatkan, normalnya adalah 1.200, 1.200 rumah sakit, industri dan lainnya itu, tapi karena pandemi kemarin dikeluarkan hanya menjadi 456.

Kemudian untuk sistem pengembangan sistem informasi pengawasan itu dari sebelumnya 2023 1,92 kami alokasikan 2024 adalah 1,2M, di mana kegiatan ini tujuannya untuk mengembangkan aplikasi, pengembangan SDM, juga untuk penilaian mandiri faskes kesehatan dan industri. Untuk pengembangan senjata nuklir A1-nya adalah pemasangan unit RDMS, kemudian juga uji coba penanggulangan senjata nuklir, bimbingan teknis nasional tanggap darurat, respon kecelakaan, dan pengawasan keamanan nuklir itu kami alokasikan sebesar 4,13M. Itu kami merencanakan 1 lagi pengembangan unit RDMS dan juga 26 unit RDMS pemeliharaan.

Saat ini kami sudah terpasang sebanyak sampai dengan tahun 2022 itu sudah terpasang 36 unit dari target kami 114 unit baru terpasang 36, dan tahun 2023 1 unit, dan *insyaallah* kami 2 unit di tahun 2024. Sedangkan untuk persiapan pengawasan PLTN, kami mengalokasikan sebesar setengah M, 500

juta kita gunakan itu lebih ke untuk sosialisasi dan juga persiapan-persiapan yang dibutuhkan di dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di pusat maupun di daerah. Dan juga kami menyusun beberapa standar yang akan diterapkan jika ada usulan perizinan PLTN.

Kami laporkan saat ini kami menerima konsultasi, jadi kami istilahnya, kami sebut dengan konsultasi karena memang belum secara resmi belum mengajukan izin, konsultasi untuk desain PLTN dari salah satu perusahaan swasta yang mereka akan membangun jenis reaktornya adalah *small modular reactor* yaitu PT Torcon Indonesia yang mengajukan ke kami untuk konsultasi, dan mereka lokasinya, lokasinya Pak, lokasinya ada di Pulau Gelasa di Provinsi Bangka Belitung.

*Nah* walaupun kegiatan ini belum secara resmi mereka mengajukan izin tetapi kami harus memberikan bimbingan ya, bimbingan teknis atau semacam konsultasi teknis, jika nanti mereka resmi mengizinkan maka seluruh persyaratan yang, yang diperlukan itu sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan di dalam perizinan. *Nah* kegiatan ini juga kami gunakan salah satunya untuk kegiatan tersebut, di tahun 2023 juga di tahun 2024.

Kemudian untuk unit kami ada perumusan pengembangan undang-undang, kami juga melakukan beberapa, tetap melanjutkan penyusunan Rencana Undang-Undang Ketenaganukliran, kemudian juga menyusun peraturan PP (Peraturan Presiden) dan Perba terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin juga sudah dilakukan revisi dan juga beberapa PP yang harus kita sesuaikan atau revisi untuk di tahun 2024. Demikian yang Mulia, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

BAPETEN *nah* ini BAPETEN soal nuklir saya kira ke depan harus jauh-jauh lebih aktif, kita tahu dengan berbagai konsekuensinya menyangkut anggaran, kenapa demikian? Kita sama-sama tahu dalam bisnis sektor energi kita sepakat bahwa bicara energi disamping besar, besaran energi listrik katakanlah ke depan yang meningkat pesat, tetapi juga selalu dikaitkan dengan *nett zero emisions*, bahkan sudah menjadi kesimpulan kita bahwa *without* nuklir hampir tidak bisa dicapai *nett zero emisions* di tahun 2060 itu.

Maka BAPETEN nanti juga pasti nanti di dalami dengan rekan-rekan yang lain, harus mulai aktif memperkenalkan manfaat dan mudarat-nya PLTN, sekali lagi harus pro aktif besar-besaran ini hari-hari ini, melakukan survei, melakukan sosialisasi, melakukan ada semacam komparasi, juga misalnya nuklir generasi ke sekian yang di dunia kita sebaiknya **ada**, apa, ada namanya modular dan sebagainya, karena beberapa waktu lalu kami Komisi VII dengan Pak Mul bahkan ya mengunjungi PLTN di Hongaria itu generasi pertama termasuk, tapi memang luar biasa *capacity factor*-nya masih 95% yah, jadi masih sangat, sangat handal sekali, saya kira ini penting nanti coba kita

rumuskan di kegiatan-kegiatan yang harus ada lebih intens. Saya kira itu. Dilanjutkan Kepala BIG.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi VII yang kami hormati, dan; Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Badan Informasi Geospasial untuk Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Juni telah merealisasikan anggaran sebesar 31,77% dan ini sudah *in-line* dengan target dari Bulan Juni yang kita canangkan, sementara itu terjadi beberapa perbedaan untuk program dukungan manajemen itu sudah terealisasi 45%, sedangkan untuk program penyelenggaraan informasi geospasial itu sudah terserap 25%.

Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Badan Informasi Geospasial ini mendukung untuk prioritas nasional antara lain prioritas nasional nomor 1, nomor 2, nomor 6, dan nomor 7, yaitu yang pertama tentang garis pantai yang termutakhirkan ini kita targetkan 9.000 kilometer persegi, kemudian layanan data *centre* satu buah layanan, kesepakatan teknis batas wilayah ini penting sekali untuk administrasi desa dan untuk mendukung pembangunan berbasis desa, itu kita anggarkan untuk 15.000 desa tahun ini. Kemudian juga titik pantau geodinamika yang dikelola ini ada 107 unit titik pantau, seperti kita ketahui ini sangat penting sekali untuk *monitoring* geo-dinamika, dan juga stasiun InaCORS yang dibangun itu ada 42 stasiun, sekaligus nanti juga Stasiun Pasang Surut itu ada 33 stasiun, stasiun ini sebetulnya kepentingan kami adalah untuk referensi peta agar kalau kita membuat yang skala detail 1:5.000 itu semakin *rigid* dan semakin bagus, tapi juga pada perjalanannya bisa digunakan untuk *monitoring* tsunami, sehingga masuk dalam program Inatwist. Kemudian prioritas nasional yang lainnya adalah.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Maaf Pak, *mic*-nya agak dekat Pak.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Terima kasih, *test*, kemudian untuk PN7 itu ada kesepakatan teknis perundingan batas darat dan batas laut, *nah* ini sangat *urgent* sekali untuk memastikan batas negara kita baik di darat dan di laut, tahun ini kita akan upayakan untuk 10 kesepakatan dengan negara tetangga itu bisa berjalan baik darat maupun laut. Kemudian juga kita akan menambah pilar batas negara di perbatasan, perbatasan darat tentunya, ini ada 106 unit dan kita seperti biasanya akan bekerjasama dengan TNI untuk penyelenggaraan pilar ini.

Kemudian juga penambahan peta batas negara itu kira-kira akan kita tambahkan 3.800 kilometer. Sampai dengan saat ini untuk garis pantai prioritas yang termutakhirkan ini sudah kita laksanakan sebesar 38% untuk alokasi anggaran dan itu berada di Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, tentu kegiatan

ini penting sekali manfaatnya dalam menentukan luas wilayah kita termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* serta penegasan batas laut antar negara.

Kemudian untuk layanan data *centre* seperti kami tadi sudah sampaikan ada 1 layanan yang sampai saat ini sudah berproses itu ada 41% serapan anggarannya, ini untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4/2011 salah satunya dengan menyediakan infrastruktur nasional berupa data *centre* sebagai penghubung simpul jaringan yang digunakan oleh kementerian lembaga maupun pemda.

Kemudian untuk kesepakatan teknis batas wilayah desa atau Kelurahan ini sudah kita laksanakan, untuk Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan dimana pada bulan-bulan ke depan ini akan terus berlangsung, sampai saat ini sudah menyerap 37% penganggaran.

Kemudian untuk titik pantau geo-dinamika itu kira-kira sudah sampai 41% dengan lokasi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, ini penting untuk melakukan pemutakhiran terutama di daerah-daerah yang dinamis misalnya daerah sesar aktif atau daerah lempeng aktif untuk mengetahui pergerakan lempeng, dan ini tentunya yang memanfaatkan tidak hanya BIG (Badan Informasi Geospasial) tapi juga instansi lain Geologi, BMKG, dan lain sebagainya.

Kemudian untuk stasiun CORS (*Continues Operating Reference Station*) ini merupakan program nasional untuk mitigasi multibencana yang diselenggarakan juga dalam rangka mendukung untuk reforma agraria dalam percepatan sertifikasi tanah, kita ketahui CORS ini ternyata multifungsi, selain juga untuk kepentingan agraria bisa juga untuk kepentingan mitigasi bencana, dan ini akan kita laksanakan di Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali.

Kemudian untuk stasiun pasang surut kita akan menambah 33 stasiun lagi untuk penguatan Inatwist dalam rangka penanggulangan kebencanaan sekaligus fungsinya untuk referensi vertical nasional untuk survei dan pemetaan kita, kita akan membangun 33 stasiun di beberapa pelabuhan yaitu di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa.

Kemudian juga untuk perundingan teknis batas darat dan batas laut ini ada 10 kesepakatan, nantinya ada 4 perbatasan yang akan kita prioritaskan di tahun ini, RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan juga di laut Asia Pasific. Kemudian untuk pilar batas negara kita targetkan kita akan membangun 106 pilar, itu antara lain antara perbatasan kita dengan Malaysia dan perbatasan kita dengan Timor Leste serta kita dengan PNG.

Kegiatan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas negara ini dalam rangka dukungan survei teknis untuk percepatan penyelesaian permasalahan batas darat antara negara kita dengan negara tetangga, sekaligus sebagai verifikasi titik dasar, seperti kita ketahui Bapak Presiden pada saat ini berada di Malaysia salah satu topiknya adalah terkait dengan perbatasan yang kemarin kita juga sudah menyampaikan beberapa materi teknisnya ke Sekretariat Presiden.

Kemudian untuk peta batas negara kita juga akan melakukan penambahan seluas 3.800 kilometer persegi, ini untuk menunjang prioritas nasional ketujuh yaitu memperkuat stabilitas Polhuthankam dan transformasi pelayanan publik, nanti prioritas kita untuk RI dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.

Demikian kira-kira 2023 yang sedang berjalan saat ini, dan kemudian untuk kegiatan bakti inovasi yang didukung oleh Bapak/Ibu Komisi VII saat ini kita sudah melaksanakan 11 kegiatan bakti inovasi di berbagai tempat Sumatera, Batam, Bombana, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Jogja dan lain sebagainya, kemudian 3 segera akan dilaksanakan dalam waktu dekat Bapak Pimpinan, dan 9 menunggu jadwal, serta 8 masih dalam proses revisi anggaran kita, karena kita harus melakukan penyesuaian revisi anggaran.

Mohon izin kami melaporkan sekaligus untuk pagu indikatif 2024 sesuai dengan surat bersama pagu indikatif yang sudah tersampaikan kepada kita, untuk dukungan manajemen itu semula 154 miliar menjadi 171 miliar, dan untuk penyelenggaraan informasi geospasial dari 278 menjadi 261, sehingga untuk tahun 2024 *in total* kita akan melaksanakan kegiatan dengan penganggaran dukungan penganggaran Rp432.905.813.000,- ini terjadi pergeseran sebesar 16 miliar dari program informasi geospasial ke dukungan manajemen dalam rangka beberapa hal penting ini memang kita harus lakukan.

Pertama penyelenggaraan kegiatan bakti inovasi untuk 2024, kemudian juga penyusunan *baseline* RPJMN seperti kita ketahui ini akan kita mulai untuk yang 2025-2029 termasuk juga reinstra. Kemudian juga penyelenggaraan Rakornas IG di 2024 dan pekerjaan yang agak mendesak adalah renovasi gedung dan bangunan aset untuk di IG.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Sementara itu rencana *output* strategis kita untuk tahun 2024 masih kita akan mendukung untuk prioritas nasional pertama, kedua, keenam, dan ketujuh, nanti masing-masing ada garis pantai prioritas 9.000 kilometer, kesepakatan teknis batas untuk administrasi desa ini akan kita targetkan 4.000 desa, kemudian data *centre*, kemudian Stasiun InaCORS kita akan tambah 45 lagi, untuk Stasiun Pasang Surut kita akan tambah 21 lagi, dan untuk titik pantau geodinamika yang terkelola dengan baik itu 108 unit.

Dan sesuai dengan yang kita lakukan untuk keberlanjutan dari tahun ini antara lain adalah kesepakatan teknis perundingan batas laut, batas darat, dan pembangunan beberapa pilar antara Indonesia dengan Malaysia sebanyak 20 unit, Indonesia dengan Timor Leste 16 unit, dan Indonesia dengan PNG 40 unit.

Demikian untuk rencana *output* strategis BIG di tahun 2024, dan untuk rencana pelaksanaan bakti inovasi di 2024 sementara kita rencanakan 26 lokasi yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua, seperti pada tayangan ini tentu kita mohon masukan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi VII untuk pelaksanaan ke depan. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih waktu saya kembalikan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, Badan Informasi Geospasial, jadi dengan berbagai program yang telah dan sedang berlangsung dan juga *planning* di tahun 2024, saya kira BIG juga memiliki peranan yang sangat-sangat strategis hari-hari ini, kita tahu bagaimana konflik kawasan terus mengemuka di laut Cina Selatan juga demikian. *Nah* saya kira BIG harus terus mempertegas wawasan nusantara yang pernah kita *declire* sedemikian rupa, konsep Prof. Muchtar Kusuma Atmaja, dengan dulu ada pakar-pakar kita, dan ini menjadi penting juga bagaimana landas kontinen dan sebagainya.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena menyangkut tambang, saya kira kita ingat bagaimana peristiwa *spratly paracel* dan sebagainya itu *kan* karena ketakjelasan, tadi ada sejumlah langkah yang mau dilakukan saya kira bagus sekali, menyangkut misalnya juga sumberdaya kita, kita di sektor hulu sebagaimana kita ketahui kita temukan cadangan baru gas yang sangat besar di Andaman itu juga harus segera dipetakan karena itu juga sudah dekat-dekat wilayah di atas Aceh sana. *Nah* ini menjadi penting disamping tadi ada peringatan dini dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya kira itu Bapak/Ibu sekalian baik BAPETEN maupun BIG setelah menyampaikan beberapa, kita lebih khusus sekarang bahas dulu di tahun 2023, di APBN 2023, dipersilakan, kita ini saja ya saya kira apa, ya Pak Mul dipersilakan Pak Mul.

**F-PKS (Dr. H.MULYANTO, M.Eng):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII;  
Bapak Kepala BAPETEN;  
Bapak Kepala BIG dan jajarannya.

Saya sudah mencermati Pak, laporan yang disampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sepatok sekali dan mendukung apa yang disampaikan Bapak Ketua ya, BIG ini mempunyai peran yang sangat vital terutama dalam menyediakan informasi geospasial secara akurat, tepat, karena memang kita ini harus berbasis data, dan data kita tidak cukup hanya sekedar *numerical*. Jadi *alhamdulillah* dengan Undang-Undang Informasi Geospasial data kita bisa kita bedakan ya, data numerik dan data spasial, kalau data numerik kan hanya menjelaskan angka tidak tahu ada dimana barang itu, ketika dia diletakan di dalam peta, di dalam sebuah *space* tertentu jadi *clear* definitif koordinatnya.

*Nah* ini menjadi sangat akurat dalam kita mengelola negara baik itu perbatasan maupun ketahanan nasional, karenanya *one map policy* ini *kan* menjadi sesuatu yang harus kita dukung, peta jangan tumpang tindih harus jelas satu, IG dasar yang utamanya nanti **GT matik** *nggak* ya, *nggak* tidak boleh tumpang tindih harus di dalam daftar yang, yang sama. Karenanya terus terang

kami mendukung Pimpinan, cuma memang ada hal yang mengganjal ini, justru di tahun 2024 terjadi penurunan angka sebesar 50 miliar.

*Nah* ini yang harus kalau bisa dikembalikan nanti kita dorong agar tetap, ya minimal tetap, kalau bisa naik. Saya sudah merasakan ya salah satu bentuk bakti inovasi yang merupakan forum sosialisasi BIG kepada masyarakat, terkait batas wilayah, terkait ketahanan nasional, ini ternyata masyarakat antusias merasa tercerahkan. *Nah* tentunya ini hal yang positif ya yang perlu didukung, karenanya saya mengusulkan ini *nggak* cukup kalau hanya 26 ya, ini harus 3x lipatya paling *nggak* 78 itu, jadi itu saya sangat mendukung sekali terkait dengan BIG ini agar bisa ditingkatkan terkait bakti inovasinya.

Yang kedua, terkait BAPETEN ini *kan* sudah sangat jelas ya kita sedang membahas Undang-Undang EBT mudah-mudahan rampung, salah satunya adalah kita dapat menyimpulkan ya, kita sudah komitmen 2050 ya *nett zero emissions*, kita tahu *kan* kita mengandalkan tenaga surya, tenaga surya *kan* ini apa, *nggak* bisa di malam hari, adanya cuma di siang hari, teknologi baterai kita belum berkembang *kan*, *nggak* bisa nyimpan banyak-banyak.

Karenanya kita membutuhkan sumber energi pengganti batubara yang bersifat *base load*, *nah* itu hanya mungkin substitusi dari batubara itu dengan nuklir, dan skenario besar energi nasional sudah menghitung dan mensimulasikan itu, maka opsi nuklir akan muncul di tahun 2035-2040, seingat saya itu yang akan munculnya.

Karenanya selain di RWBT juga ada penekanan untuk nuklir, saya baca hari ini juga di media ya, apa DEN sudah menyerahkan draf dari pembentukan NEPIO (*Nuclear Energy Implementing Organisations*)-nya sudah diajukan dan sekarang bolanya di Menpan ya? Artinya pemerintah sudah menata itu. Karenanya sekali lagi saya mendukung apa yang disampaikan Pak Sugeng, karenanya BAPETEN sudah mulai sedikit menambah konsentrasinya dari pengawasan radiasi dan zat radio aktif termasuk limbah radio aktif di dalamnya sedikit ke arah tenaga nuklir.

Karenanya nanti materi-materi sosialisasi ini pun mengarah ke penyadaran masyarakat tentang ketenaganukliran ini, jadi ketika nanti introduksi PLTN masuk masyarakat tidak kagetan, "Oh PLTN ini barang yang apa ini, mengerikan", *nggak* mereka sudah siap. Kalau radiasi saya rasa sudah *friendly* yah karena mereka sering *rotgen kan*, *nah* tenaga nuklir ngeri itu ada kata tenaganya itu yah, *nah* ini perlu sekali.

Dan *alhamdulillah* sudah ada peningkatan sedikit BAPETEN ini, karenanya kami juga dorong Pak, ini maen dorong-dorong terus ini Pak, pokoknya yang namanya anggaran itu kita dorong saja Pak, tambah saja Pak tidak ada istilah kurang, kalau perlu kali Pak, jadi kami dorong apalagi terkait sosialisasinya yang kemarin bagus sekali, *happy* sekali, mudah-mudahan bisa jangan hanya satu kali itu Pak, kalau bisa lebih yah Pak, 3 lah minimal yah, 3 itu minimal. Demikian dari kami Pak.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Tadi Pak Mulyanto menggaris bawahi bahkan mempertegas kembali bagaimana ke depan PLTN nampaknya sudah sesuatu yang harus ada kalau kita mau *nett zero emissions*, sayangnya ini BATAN *nggak* disini ya, kalau ada BATAN di sini sekaligus *integrated* ya, secara komprehensif berfikir ini BAPETEN. Tadi juga BIG digaris bawahi bagaimana tapal batas.

Saya kebetulan pernah di BPN, Badan Pertanahan menjadi penting sekali kita tahu di pengadilan itu hampir 70% adalah sengketa tanah salah satunya, jadi dengan sistem yang apa, *one map* dan juga bagaimana pemetaan di pertanahan dan sebagainya karena di sana juga di BPN, ATR/BPN itu ada program yang menyangkut tentang sertifikasi dan sebagainya saya kira menjadi penting. Kalau memang perlu alat yang canggih yang apa ajukan saja, betul ini dan seterusnya, seterusnya.

Dipersilakan Pak Bambang.

**F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

**F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):**

Yang saya hormati Pimpinan;  
Rekan-rekan Komisi VII;  
Yang saya hormati Kepala BAPETEN dan BIG serta seluruh jajaran pejabat yang hadir.

Yang pertama sisi anggaran kalau dari tahun 2020 pagu awal selalu fluktuatif, tapi kalau lihat pagu akhir *kan* selalu naik dari paparan Bapak ini, tentu ini mendorong untuk mekanisme pengawasan internal agar lebih ketat, jangan sampai di belakang hari baru ketahuan antara yang kita cairkan, yang kita keluarkan dengan kondisi di lapangan jauh, jangan sampai terjadi itu.

Kemudian tadi disampaikan ada perusahaan swasta yang konsultasi terkait Bangka, pertanyaan saya kita ini *kan* punya banyak cadangan torium, apa sudah ada riset-riset atau kemungkinan Pembangkit Tenaga Nuklir itu berbasis torium? Karena Bangka ini *kan* timah, dan proses *smelter* pemurnian itu *kan* di sana ada di antaranya torium sayang kalau kemudian kita sia-siakan.

Jadi pertanyaan saya, apakah itu sudah mulai diinisiasi? Karena beberapa negara termasuk India ini sudah lama menggunakan Pembangkit

Listrik Tenaga Torium dan aman-aman saja, saya rasa itu. Dan kalau boleh tahu torium selama ini disimpan di mana? Khawatir saya ini *export* timah keluar termasuk yang ilegal dikeluarkan toriumnya tidak terditeksi, kita kehilangan banyak cadangan, karena ada tokoh kita yang justru membangun perusahaan itu di pengayaan torium di luar negeri, saya jadi prihatin ini, mungkin Bapak juga tahu. Saya rasa itu saja Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya terima kasih Pak Bambang, jadi menekankan kembali bagaimana saya kira betul BAPETEN dan juga nanti BATAN harus terus ini aktif harus giat riset dan sebagainya, kenapa? Betul tadi bahwa ada yang namanya logam tanah jarang disitu ada, bahkan itu konon kabarnya itu Lapindo itu juga mengandung logam tanah jarang, di situ ada torium dan seterusnya ini bahasa-bahasa teknis pasti Bapak-Bapak yang tahu.

Jadi intinya itu terus mengembangkan riset bagaimana bahkan sampah nuklir itu sekarang bisa diolah menjadi baterai, *kan* aneh lagi ini, yang itu sedemikian rupa uranium 238 atau uranium 236 atau apa itu, ada semuanya klasifikasinya, salah satu contohnya yang sudah sangat berhasil ternyata lunar itu pesawat luar angkasa itu baterainya berbasis dari nuklir itu dan sekarang sudah ada laptop yang berbasis, berbahan baku baterai berbasis nuklir yang itu tidak pernah *dicash* sudah sepanjang hayat, mungkin ada istilah kalau kita jaman SMA ini hukum kekekalan masa atau kekekalan energi mungkin ini.

Saya kira itu, yang lain kok, kok yang angkat dulu Pak Hendrik habis itu Ibu Roro kok hari ini luar biasa yah, kok terus sekalian ada Mba Ratna *gitu* loh yah.

**F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII, serta; Kepala BAPETEN, Kepala BIG beserta jajaran yang kami hormati.

Pertama, saya sampaikan saya Hendrik Sitompul dari Sulut I ucapkan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Pertama, saya menanyakan Kepala BAPETEN, Pak Kepala saya sudah membaca ini realisasi anggaran Bapak sampai Juni ya Pak ya, tapi saya buka-buka di sini PNBPNya *nggak* ada Pak disini ya Pak? *Nah* ini penting, karena *kan* pasti Bapak ada PNBPNya, saya lihat tidak ada di sini PNBPNya, kita ingin tahu juga Pak dimana nanti juga anggaran realisasi anggaran *versus* dengan PNBPNya, itu Pak ya tidak ada Pak ya.

Berikutnya di sini saya lihat banyak kegiatan ya Pak, kegiatan ada capaian penting, kegiatan ada capaian penting, saya lihat sudah saya baca, hanya pertanyaan saya Pak, tolong dijelaskan kita juga pasti pelaksanaan ini pasti punya ada masalah juga, ada kendala, tolong jelaskan sama kita apa kendalanya, apa masalahnya, dan apa solusinya, karena di sini saya baca ada



capaian penting Bapak buat di sini, apakah capaian penting ini dengan solusinya yang masalah itu linear *nggak* gitu kira-kira?

Kita mohon penjelasan, kita juga ingin tahu apa yang Bapak kerjakan, apalagi contohnya inspeksi-inspeksi ini dan lainnya. Saya kira *gitu* saja semua pelaksanaannya saya kira pasti ada masalahnya, terus apa solusinya *gitu*? Kita ingin tahu karena juga terkait juga alokasi dan realisasi *kan* juga kita lihat apakah memang alokasi per misalnya Juni ini dengan targetnya itu sama tidak dengan targetnya, pasti *kan* bulan per bulan *kan* punya target atau realisasinya *gitu*, kita ingin tahu juga.

Itu Pak Penjelasan, yang berikutnya di BAPETEN *nggak* ada bakti inovasi Pak yah? *Nggak* ada gitu ya? Ada? Oh kita belum dapat Pak, ada Pak yah, oh ada? Oh ada. Ada ya? Ada Pak ya? Oh ada, ada Pak ya? Konkret ini teman-teman ada kok aspirasi. Saya kira itu saja untuk BAPETEN, saya kira kita mau lihat kendala-kendala saja Pak, solusinya apa dan mudah-mudahan di 2024 saya lihat kegiatannya ada regular saya kira begitu yah, yang khusus ini yang sangat rawan sebenarnya saya melihat yang sertifikasi-sertifikasi ini Pak yah, itu yang, karena *kan* terkait dengan pihak luar ya Pak, perizinan, perizinan, sertifikasi, perhatian segala macamnya kira-kira begitu. Itu untuk BAPETEN.

Untuk BIG, Pak Kepala BIG kita sudah melakukan bakti inovasi di batas desa Pak, cuma teman-teman Kepala Desa lagi nunggu apa *next*, apa berikutnya *gitu* loh, memang senang mereka senang, terima kasih *lah* buat BIG ya, tapi mereka juga ingin apa? Hadiah selanjutnya buat mereka *gitu* loh, artinya program apa, supaya mereka juga tahu memberikan batas-batas yang desa yang mereka akan lakukan itu bisa terealisasi, apakah ada program lanjutan *gitu* loh? Apakah ada anggaran kesana atau bagaimana, ini mohon penjelasan Pak Kepala BIG kepada kami supaya kami juga kepala desa kami yang jadi konstituen kami itu bisa *nggak* lari 2024 nanti, itu masalahnya *kan*, karena Kepala Desa penting bagi kami. Demikian Pimpinan kami sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, Pak Hendrik Sitompul dari ini bahasanya ATHG-nya itu Pak, Ancaman, Tantangan, dan Hambatan dulu dalam istilahnya *gitu*, ini memang kalimatnya agak orde baru sekali. Dipersilakan Mba Retno, eh Mba Retno, Mba Roro, ini kita gara-gara *nggak* ada Mba Ratna ini.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim.*  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pak Ketua Pak Sugeng, Pak Eddy beserta seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan;



Yang saya hormati juga para Mitra Kerja kami Kepala BIG dan juga BAPETEN.

Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan, mohon maaf tadi saya sedikit telat, tapi tetap sempat untuk membaca dan melihat beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan bersama. Jadi yang pertama untuk BIG saya ada 3 poin inti, jadi yang pertama berkaitan mengenai wilayah administrasi desa, saya menyadari bahwa ini program yang selama ini sudah berjalan dan tadi juga dinyatakan progresnya seperti apa, kita mengetahui bahwa target untuk tahun ini *kan* untuk 15.000 desa dengan alokasi anggarannya ada 5,14M dan saat ini progresnya mencapai 37%.

*Nah* oleh karena itu saya ingin mengetahui khususnya kalau kita melihat total desa di Indonesia itu *kan* banyak sekali ada sekitar 81.616, *nah* oleh karena itu saya ingin mengetahui apakah, karena ini *kan* dibatasi 15.000 desa, di kemudian hari atau di *project plan* yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 apakah akan ditingkatkan jumlah desa yang kemudian akan dilakukan sosialisasi berkaitan mengenai batas wilayah desa tersebut, karena kalau saya di lapangan dengan masyarakat ketika reses kemarin terakhir itu banyak sekali *dispute* ya terkhusus wilayah desa yang kebetulan juga merupakan wilayah misalnya hutan sosial *gitu*.

Lalu kemudian bagaimana pembagian wilayah karena semuanya itu sifatnya *nge-claim* gitu bahwa ini milik kita gitu, apalagi ketika hutan sosial itu kemudian digunakan untuk berbagai macam hal dan digunakan oleh masyarakat yang tinggal di desa di sekitarnya atau bagian dari wilayah hutan sosial tersebut, wilayah sosial hutan itu.

*Nah* oleh karena itu saya ingin mengetahui apakah program berkaitan mengenai wilayah administrasi desa ini ataupun kelurahan bisa ditingkatkan di kemudian, di tahun berikutnya terkhusus di tahun 2024. *Nah* itu yang pertama.

Lalu kemudian berkaitan mengenai tadi sudah disampaikan tentang *one map policy* ya, saya ingin tahu mohon disampaikan kepada kami dan *insyaallah* nanti diberi kesempatan juga oleh ketua agar dipaparkan sebetulnya visi *one map policy* menurut para mitra kerja kami hari ini itu seperti apa *gitu*, karena kalau saya berpikir mengenai *one map policy* itu sebuah peta yang betul-betul di mana terdapat berbagai macam layer. Jadi layernya itu bisa untuk kepentingan itu tadi misalnya administrasi wilayah desa, desa ini wilayahnya dimana, atau sekabupaten, provinsi, jadi pembagiannya itu seperti apa?

Itu mungkin secara garis besar peta *gitu* ya, tapi disamping itu sebetulnya visi kita bertahun-tahun lalu itu juga sudah menyampaikan alangkah baiknya misalnya wilayah hutan itu *kan* tipe hutan itu macam-macam, ada hutan lindung, ada hutan yang khusus untuk konservasi, kemudian juga hutan yang bisa dialokasikan untuk misalnya *kan* sumber daya alam *kan* banyak ya, salah satunya geothermal *gitu*.

*Nah* saya ingin mengetahui apakah nanti kemudian ada layer berikutnya yang bisa memberikan peta khusus menunjukkan bahwa wilayah ini adalah hutan lindung, wilayah ini adalah hutan konservasi, wilayah ini bahkan *kan* ada hutan sosial juga, pemerintah sudah memperjuangkan program itu di

Kementerian Lingkungan Hidup sebetulnya, jadi beberapa tahun ini saya itu memantau juga mengenai program itu.

Di sisi lain kita karena komisi yang berkaitan mengenai energi ya, ketika kita berbicara mengenai sumber daya alam *kan* banyak sekali gitu, baik itu tadi saya sudah sampaikan *geothermal reserve* 40% sendiri saja di Indonesia *gitu*, alangkah baiknya nanti kalau ada layer lagi yang betul-betul menunjukkan bahwa wilayah ini loh, kita itu *geothermal reserve* terbesarnya itu di poin A misalnya. Lalu kemudian apalagi kita ingin meningkatkan jumlah *lifting* di Indonesia apalagi sekarang dengan target 1 juta barel yah Pak Ketua ya, jadi paling tidak kita juga mengetahui *oh oil reserve* yang terbanyak itu ada di wilayah mana *gitu*.

Sebetulnya mungkin kalau sudut pandang saya yang selama ini diimpikan dengan adanya *one map policy* adalah untuk kemudian menggambarkan layer-layer tersebut di dalam sebuah sistem, mungkin *online integrated map* gitu ya yang bisa menjadi rujukan untuk lintas sektor, jadi misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa rujukannya di *one map* tersebut, dari Kementerian ESDM juga melihatnya di map itu dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi saya kepingin tahu sebetulnya visi *one map policy* itu selama ini seperti apa dan progresnya untuk kemudian mencapai target itu tuh seperti apa, *nah* itu salah satu yang ingin saya tanyakan.

Lalu kemudian saya tadi melihat di paparannya BIG misalnya di *slide* nomor 9 itu realisasinya di tahun ini, apalagi sekarang kan sudah Bulan Juni yah, jadi saya itu mikir optimalnya sebetulnya kalau realisasi sebuah program itu 50% atau 40-lah, 40%-50%, *nah* ini ada beberapa program yang masih mencapai misalnya 33%, yang pembangunan stasiun itu misalnya di *slide* nomor 9, di *slide* nomor 7 juga tadi kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa itu juga 37%, karena saya tahu banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan, jadi mohon dikemukakan juga kepada kami hambatan apa yang selama ini dialami dalam pelaksanaan program tersebut.

Dan apakah selama ini ada *barrier* dari segi komunikasi dengan pemerintah daerah, di mana program-program ini ataupun sosialisasi ini sedang dilaksanakan, karena kami di sini *kan* mewakili masyarakat ibaratnya dari Sabang hingga Merauke, dan Komisi VII DPR RI juga bisa disinergikan agar kemudian kita bisa ikut peran dalam terlibat di dalam program sosialisasi itu lalu kemudian bagaimana kita bisa menjembatani dengan pemerintah di daerah juga, karena saya rasa komunikasi lintas sektor itu sangat amat penting untuk kemudian kita mencapai *output* yang optimal terkhusus tadi untuk *mapping*.

Lalu kemudian di *slide* nomor 12 pilar batas negara, itu progresnya itu paling kecil dia berada di angka 21%, *nah* maka saya ingin tahu terkhusus untuk program yang ini juga hambatannya itu ada di mana gitu, karena jangan sampai nanti anggaran sudah kita siapkan tapi penyerapannya justru tidak optimal. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk BIG.

Dan yang terakhir untuk BAPETEN, *slide* nomor 9, sebetulnya saya ingin ini saja sih, tadi sempat baca bahwasanya ada perumusan untuk RUU

Ketenaganukliran, sedangkan undang-undangnya sebetulnya kita sudah punya tapi *outdated* mungkin ya sudah tahun 1997, kami mudah-mudahan siapa tahu nanti di periode berikutnya kita bisa bantu kawal Pak Ketua, mengenai RUU Ketenaganukliran ini.

Saya ingin mengetahui sebetulnya terobosan inti dari sosialisasi dan pembahasan yang selama ini dilakukan itu seperti apa, dan ketika kita berbicara mengenai pemanfaatan dari nuklirnya sendiri itu seperti apa, karena yang selama ini terfokuskan itu kan lebih mungkin untuk *medical perpetual* dan lain-lain ya Pak, sedangkan kalau untuk listrik itu *explicitly* di dalam undang-undang *existing* belum ada, nah apakah usulan daripada RUU Ketenaganukliran ke depannya itu mencakupi bagaimana kita dapat memanfaatkan nuklir untuk listrik, *gitu kan*, PLTN dan lain-lain.

Lalu kemudian ada di *slide* nomor 6, 7, dan 8 ada beberapa misalnya pengembangan sistem informasi pengawasan partisipatif ketenaganukliran, peningkatan sistem keamanan dan kesiapan nuklir nasional, dan pengembangan sistem pengawasan PLTN, ini semuanya sebetulnya temanya sama *gitu*.

Sebetulnya yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang BAPETEN sejauh mana sih negara Indonesia saat ini itu bisa ataupun dapat melakukan pemanfaatan PLTN-nya tersebut *gitu*, memang banyak dorongan sebetulnya Pak, dan *political will*-nya itu ada karena kita ingin membuka agar, apalagi sekarang dengan pembahasan RUU EBET energi baru itu *kan* juga mencakup di nuklir *gitu*.

Jadi kita ingin agar secara politik nuklir itu tidak lagi menjadi *last options* tapi menjadi *vibe option*, tapi dari sudut pandang Bapak *gitu* ya melihat pengembangan misalnya PLTN atau nuklir secara keseluruhan di Indonesia itu terkhusus pemanfaatan PLTN dari segi pengawasannya hingga informasi dan infrastruktur tadi dengan berbagai macam program yang sudah di-set itu seperti apa Pak secara garis besar agar kami mengetahui perspektif BAPETEN untuk kemudian menjadi masukan juga sekaligus ya di dalam pembahasan RUU yang selama ini sedang kita lakukan dan diskusikan dengan Kementerian ESDM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ketua, terima kasih kesempatannya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, banyak hal digaris bawahi Ibu Roro ya, iya dipersilakan, Pak ini dulu, Pak Kyai dulu tadi, setelah Pak Kyai, Pak Bambang, Ibu Ratna, Pak Willy, sudah datang ya Ibu Ratna ya?

**F-PKS (H.NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.



Kita jarang bertemu ini dengan Badan Informasi Geospasial dan BAPETEN saya coba ke BIG dulu, sudah diurai sebetulnya oleh teman-teman cuman saya hanya ada titik tekan yang lain, pertama memang ini BIG ini dirintis sejak jaman Habibie yah tapi pekerjaannya ternyata banyak, persoalan DTKS saja pendataan, sensus segala belum beres-beres, selalu ada dinamika dan *update* tentunya.

Kemudian ini menyoroti anggaran juga ini, anggaran ya terus terang pekerjaan besar begini dengan anggaran terbatas tapi saya pikir tergantung kinerja BIG, kalau kinerjanya makin mantap saya usulkan Pak Ketua ini harus ditambah, walaupun dalam penganggaran pada tahun ini, tapi menuju penganggaran 2024 kenapa jadi turun ini? 40 miliar, sementara yang untuk berbasis gaji pegawai naik, dan daya serapnya juga di sini masih 25%, harusnya ada percepatan.

BIG ini *kan* sebuah data yang menjadi basis kinerja untuk kementerian-kementerian lain langkah, ini saya ingin dengar juga ini di sini ada pusat data yah, ada webnya mungkin bisa ditampilkan satu data Indonesia akses informasi geospasial terintegrasi, mungkin bisa dicontohkan ditayangkan, kita ingin, ini pekerjaan besar yang programnya bertahap.

Saya pikir harus diprogres sampai mana ini, karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita seringkali bangsa kita ini *kan* reaksioner *kan*, bekerja tanpa data, penguasaan di era negara modern *kan* kekuatan BIG data ini kekuatan yang sangat luar biasa, dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa, bahkan teman-teman tentara saya pernah dengar untuk menjaga NKRI ini *nggak* gampang, basis data ini yang harus kuat.

Terus persoalan sosialisasi disini di halaman 16 ini pelaksanaan bakti inovasi foto, saya kok *nggak* ada yah? *Nggak* ke semua dewan di, ini saya pikir perlu setiap dapil ada sosialisasi seperti ini, karena ini mahluk badan, badan ini ini sangat elit dan sangat, saya sendiri baru ngarti juga ini saya baca-baca.

Itu beberapa catatan saya, yang jelas keseriusan dari pimpinan, dari kita semua untuk hal ini persoalan mendasar satu data Indonesia ini harus segera dipercepat jangan sampai kita terlambat. Itu saja Pak Pimpinan Komisi, sederhana saja apa saya maunya, dan urusan yang rumit-rumit urusan BIG nanti, yang jelas kita *back up* supaya sosialisasi ini, supaya teman-teman dibawah juga infrastruktur pemerintah daerah sadar akan ini, supaya percepatan ini cepat terealisasi, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Nurhasan, sederhana tapi nyata adanya *gitu*, syair lagu itu. Dilanjutkan tadi setelah ini Pak Bambang, Pak Bambang dulu atau siapa tadi? Oh Pak Willy dulu, Pak Willy, Pak Willy ya silakan.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Mitra Komisi VII BAPETEN dan BIG.

Saya pertama ke BAPETEN, apa yang telah disampaikan dari evaluasi dan juga Rencana Kerja Anggaran 2024 ya, kalau kita melihat dari evaluasi ini sudah surplus ya kelihatannya sudah melampaui target, artinya ini kinerjanya sudah cukup bagus, ya mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun itu catatan kami.

Dan tentu juga kalau kita melihat dari ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tugas dari BAPETEN ini yaitu menyangkut masalah nuklir, nuklir ini bisa kita katakan untuk NKRI ini masih belum begitu apa namanya tersosialisasi kalau kita melihat dibandingkan dengan energi lainnya, padahal nuklir ini kalau kita melihat fungsi dan apa namanya, sifatnya dia termasuk energi baru terbarukan yang juga bisa tergolong dalam rangka kita persiapan untuk transisi energi, jadi penting sekali sosialisasi penggunaan energi nuklir ini salah satu alternatif, ya mungkin kata-katanya bukan hanya alternatif ya memang harus kita dorong *gitu* supaya Indonesia menjadi negara yang juga tidak kalah dengan negara-negara lain dalam penggunaan alternatif energi.

*Nah* hanya karena kurang sosialisasi saja menurut saya, jadi tentang kebocoran nuklir yang pernah terjadi sebagai pembangkit dan itu saya pikir tidak pernah lagi terulang ya sampai dengan saat ini, jadi tidak perlu kekhawatiran itu. Artinya saya memberikan catatan untuk BAPETEN ini adalah perlu melakukan sosialisasi yang lebih, pemahaman untuk menggunakan tenaga nuklir alternatif yang paling didorong untuk Indonesia saat ini, mungkin itu untuk BAPETEN.

Saya langsung ke Badan Informasi Geospasial yang tadi juga sudah disampaikan dari evaluasi 2023 juga sudah melampaui target dan terima kasih ini Pak Profesor ya profesor muda yang sangat punya potensi saya melihat untuk mengembangkan Badan Informasi Geospasial ini.

Saya memberi catatan yang cukup banyak mungkin bisa saya katakan tapi singkat, karena yang pertama awal-awal dulu kita di Komisi VII dengan ada suatu sosialisasi yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Indonesia satu peta, artinya tidak ada lagi peta-peta yang beda *gitu*, artinya dari semua Institusi mungkin kecuali punya militer, tapi penggunaan untuk ekonomi, sosial dan lain-lainnya itu saya pikir itu harus satu peta, karena saat ini dengan belum adanya keseragaman peta di republik ini, ini banyak sekali kesulitan-kesulitan kita, hanya saja yang perlu diperhatikan dalam Indonesia satu peta itu adalah *update* daripada perubahan-perubahannya yang juga tidak kalah penting dilakukan.

*Nah* saya melihat tentang batas negara, batas negara ini itu tentu sangat membawa efek yang luar biasa apabila ini tidak segera dikerjakan dan disosialisasi, termasuk juga batas provinsi, batas kabupaten kota, dan desa yang juga sangat dibutuhkan dalam rangka BIG ini mempersiapkan Indonesia satu peta itu. Apalagi sekarang ini dikait-kaitkan dengan perizinan-perizinan,

perizinan-perizinan yang menggunakan sistem OSS dan sebagainya ini kelihatannya sangat berperanlah BIG ini untuk membantu masyarakat dalam mengurus perizinan dan percepatan lainnya supaya tidak tumpang tindih.

Saya juga berharap agar BIG ini mampu memberikan atau menyajikan data yang *ter-update* menurut saya, karena bagaimanapun kita ingin tahu tinggal berapa luas sih, berapa panjang, atau di mana saja batas negara ini yang belum tuntas *gitu*, baik itu dari segi darat maupun laut, saya *nggak* tahu kalau udara bagaimana cara memetakannya yah, *nah* tetapi dari segi darat dan laut saya pikir mungkin bisa diukur-ukur *gitu* yah berapa yang sudah terealisasi sampai dengan tahun 2023 dengan anggaran yang ada, sehingga di tahun 2024 itu ya saya pikir BIG sudah mensosialisasikan kepada negara, kepada Komisi VII ini bahwa kita butuh yang prioritas adalah batas-batas negara kita dengan umpamanya darat dengan Malaysia, dengan negara lain umpamanya itu sangat penting.

Dan berhubungan dengan itu juga tidak kalah pentingnya di tingkat provinsi kabupaten kota di NKRI ini juga sangat penting, batas-batas ini banyak sekali membawa dampak yang cukup berbahaya apabila tidak ada kejelasan-kejelasan atau patokan-patokan yang diambil dalam rangka kita memetakan batas-batas provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

*Nah* maka oleh karena itu tadi kembali saya katakan mohon dibuatkan *update*, jadi data-data tata batas negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa, sehingga progres di 2024 dan seterusnya itu kita bisa lanjut *gitu*, dan kalau memang progres itu sangat dibutuhkan percepatan berarti otomatis dengan anggaran yang tersedia yang harus dipersiapkan, saya pikir Komisi VII juga pasti akan mempertimbangkan untuk memberikan anggaran yang lebih dalam rangka percepatan untuk kita menyelesaikan tata batas atau batas-batas yang berhubungan dengan tugas dari BIG ini, yaitu yang saya pantau dari BIG ini.

Hal-hal lain menurut saya sih normatif saja Pimpinan, dan sama dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, keterbatasan dari BIG ini, mungkin termasuk juga BAPETEN ini adalah anggaran yang kalau saya melihat itu tidak memadai untuk bisa dikerjakan lebih akurat, lebih cepat *gitu*. Maka oleh karena itu pertimbangannya dari anggaran yang dianggarkan ini kalau menurut hemat kami karena kepentingannya juga sangat luar biasa, tentulah bisa diberikan peluang untuk ditambah, itu usul kami. Mungkin itu dulu dari kami, terima kasih, dan kami kembalikan ke pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, Pak Willy Midel tadi banyak hal, baik BAPETEN, lagi-lagi itu persoalan PLTN ini menjadi sangat-sangat penting, jadi ini nanti, silakan ajukan usulan anggaran untuk masalah PLTN ini, karena juga kita sebagai negara, kita bersyukur Komisi VII itu dikunjungi baik oleh Rosatum, kita juga berkunjung ke kita, Torcon ke kita, Korea ke kita, Jepang ke kita, Amerika bahkan beberapa waktu lalu, bahkan sekarang sedang menginvestasikan meskipun tahap



pertama ini kecil untuk eksplorasi di Kalimantan Barat, *eh* Kalimantan Utara itu 9 juta dolar beberapa waktu lalu, sampai sedemikian rupa.

Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri ini prinsipnya begitu, dengan konsep yang kuat, yang matang, dan sebagainya sehingga kita bisa memutuskan kebijakan tentang nuklir itu betul-betul *firm* gitu.

Dan juga tadi Kepala BIG, saya kira menjadi perhatian kita semuanya betul sekali namanya tapal batas itu menjadi *problem-problem* yang sangat serius, sekarang juga misalnya tapal batas hutan itu yang sering orang masuk penjara *kan* pengalaman saya di BPN itu beberapa orang masuk penjara gara-gara ketakjelasan batas hutan, karena distatuskan ternyata itu masih masuk wilayah hutan.

*Nah* ini yang kaya gini, kaya gini termasuk batas negara, batas desa, perang antar kampung *kan* sering sekali terjadi. Seperti tadi saya kemukakan di pengadilan itu hampir 60% itu adalah tentang sengketa tanah, *nah* ini juga menjadi *concern* kita, sehingga ayo ajukan program-program konsekuensi anggarannya juga pasti kita dukung, jadi khususnya di tahun 2024 yang akan datang.

Masih, Pak Bambang dipersilakan, setelah ini Ibu Ratna.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota Komisi VII, serta mitra, ini hadir Kepala BAPETEN, kemudian juga Kepala BIG Pak Haris, kalau sama beliau ini sudah saling *follow* di IG jadi sudah kenal.

Pimpinan, saya kadang-kadang ketika melihat kawan-kawan ini hadir dari BAPETEN maupun BIG sebetulnya ada kerinduan juga melihat yang lain-lain itu, sebelum tereliminasi mereka, terintegrasi dengan yang namanya BRIN itu. Saya sangat, sangat miris memikirkan nasib BATAN, tetapi melihat BAPETEN disini saya agak sedikit tersenyum, karena masih ada harapan di dalam bagaimana pengawasan tentang yang namanya nuklir dan sebagainya, karena implikasi yang sekarang terjadi ini sangat-sangat luas sekali dinamikanya, tentang apa yang terjadi, apalagi kita sekarang sedang membahas tentang RUU EBET (Energi Baru Terbarukan) di mana di dalam RUU itu kita nyatakan bahwa nuklir bukan lagi merupakan suatu alternatif terakhir di dalam pengembangan sumber energi kita.

Lalu kita juga melihat terbit PP Nomor 25 Tahun 2023 baru saja, jadi ini ada 2 PP, Peraturan Pemerintah yang membuat kita agak, agak riuh sebetulnya, makanya yang kemarin baru saja kita bicarakan PP Nomor 26 tentang sedimentasi, ini ada satu lagi PP Nomor 25 Tahun 2023 ini tentang wilayah pencadangan pertambangan dan salah satunya adalah tentang nuklir.

Baik, Kepala BAPETEN, ini kayanya saya baru pertama kali ini melihat anda di sini, jadi ada beberapa hal Pak, yang saya pikir kita perlu bahas, pertama.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar Pak Bambang, namanya siapa? Namanya Sugeng juga *gitu loh*.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Kalau saya melihat memang nama Sugeng ini nama-nama andalan seperti nama Bambang begitu.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini *just* ini yah, Sugeng itu cenderung kecil-kecil orangnya, dan konon ini secara sosiologi sempat dipetakan Sugeng itu lahir jaman susah kebetulan itu, jadi orangnya kecil-kecil, prihatin, kerja keras, maka meskipun kecil Sugeng itu besar tekadnya, *gitu loh*.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Itu makna sosiologinya yah? Sebaiknya kita FGD *kan* itu nanti Pak.

Baik, ini BAPETEN ini terkait dengan pemanfaatan tenaga nuklir yah, jadi Pak Sugeng, Kepala BAPETEN mustinya tim Bapak kalau ke Bangka Belitung itu sudah sering, karena kenapa? Di Bangka itu ada *smelter-smelter, smelter-smelter*, pertimahan sudah mulai dari 20 tahun yang lalu, yang kemarin saya sempat heran Pak Presiden mengatakan bahwa timah harus belajar dari nikel, padahal kita sudah dari 20 tahun yang lalu sudah melakukan peleburan, dan saya tahu bolak-balik tim Bapak sering melakukan inspeksi untuk melihat *slag-slag* hasil peleburan, baik itu *slag 1, slag 2*, itu yang, bagaimana penyimpanan dan sebagainya, karena kenapa? Itu mengandung radioaktif yah Pak ya.

*Nah* saya ingin bertanya Pak, sekarang ini juga, tadi saya ngomong sedikit nikel *kan*, saya ingin tahu apakah nikel ini *kan* mineral laterit iya *kan*, dan juga tentunya mengandung mineral-mineral ikutan lainnya, *nah* apakah di dalam proses *smelting* mereka juga terkandung mineral-mineral lain yang ketika proses peleburan terjadi pelepasan panas, sehingga merubah fisika beberapa kimia-kimia itu menjadi, radioaktifnya menjadi aktif?

*Nah*, kenapa perlu saya tanyakan karena saya selama di Komisi VII ini baru satu kali kami mengunjungi *smelter* nikel, dan begitu kami dapati saya bertanya dengan begitu besar tingkat produksi mereka saya tanya *slag*-nya dimana? Jawabannya adalah *slag*-nya adalah untuk nimbun jalan, dan bagi saya terkaget-kaget *slag*-nya buat nimbun jalan, *oke* lalu apakah *slag*-nya pernah dilakukan uji lab? Apa yang terkandung di dalam *slag* tersebut?

Jawabnya *nggak* pernah, *nah* ini kami perlu satu, satu apa jawaban dari Kepala BAPETEN apakah Bapak pernah melakukan inspeksi terhadap apa-apa, yang terjadi di *smelter* nikel seperti itu ya.

Kemudian kalau mengenai masalah monasitnya ya saya terus terang ini merasa jengkel saja dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2022, kemarin saya sudah sampaikan langsung kepada Menteri ESDM tentang PNBP-nya itu bahwa monasit hanya dikenakan 1% Pak, bahwa kalau monasit itu adalah mineral alam yang di dalamnya juga mengandung torium, ini torium alam dan seperti itu. Ya memang saya tidak tahu ini apakah mineralnya Bapak juga melakukan pengawasan Pak, ya kan? Pengawasan terhadap peredaran dan sebagainya.

Lalu saya juga ingin bertanya tentang proses dan kegiatan penyimpanan limbah nuklir, kalau di BAPETEN harusnya mungkin Bapak punya satu apa, satu tempat mungkin, saya tidak ngerti ya, tetapi yang jelas kami pernah mengunjungi BATAN, *nah* dalam hal ini karena Bapak saya anggap masih saudara dengan BATAN, walaupun dia sudah diadopsi dan jadi anak tiri di BRIN, saya khawatir Pak dengan situasi pengaturan BRIN yang begitu berantakan, padahal apa yang diolah dan di-*manage* oleh BATAN itu adalah sesuatu yang sangat *strategic*, baik itu reaktor nuklir untuk uji cobanya, baik itu beberapa limbah-limbah nuklir yang dia simpan.

Apakah kemudian dengan situasi BATAN yang seperti sekarang, saya dengar di BATAN itu sudah tidak ada Kepala BATAN ya, yang ada sestama saja, kepala misi riset dan sestama begitu ya, tidak ada lagi? Berarti benar-benar sudah di *downgrade* mereka, *nah kan* kasihan ini menjadi sub koordinat dari, dari BRIN, padahal itu *strategic*.

Kami ingin tahu Pak, berarti risetnya *kan* yang, yang, yang di apa, yang diprioritaskan di BATAN, *nah* lalu bagaimana dengan limbah-limbah nuklir yang disimpan di situ? Lalu apakah BLU yang pernah ada, itu *kan* ada BLU dia, *nah* itu yang ngatur siapa? Mungkin bisa bocoran lah dari saudara kandung *kan*, saya anggap kalau BATAN dan BAPETEN ini saudara kandung begitu, tapi dia diadopsi kasihan.

Kemudian, bagaimana pengawasan daripada BAPETEN Pak, berikutnya tentang limbah-limbah yang mengandung radioaktif isotop dan sebagainya, karena kita tahu ini *kan* industri medis berkembang pesat, kaya apa, untuk MRI dan sebagainya itu *kan* pakai isotop semua itu Pak ya, *nah* itu gimana pengawasannya perlu kami dijelaskan, kemudian jika Bapak ada BLU tolong Pak disampaikan ke kami dijelaskan, ini harus ada transparansi iya *kan*, apakah ini BLU tersebut kemudian dipertanggungjawabkan secara, secara transparan, kemudian juga apakah betul menambah kepada PNBP, *nah* ini mohon dijelaskan.

Kemudian berikut kami bergeser kepada Badan Geospasial, selama saya di Komisi VII ini dengan BIG ini saya dua kali kegiatan, pertama di Bangka dan yang kedua di Pulau Belitung, Pak Haris ya, *nah* jadi memang kalau dari, dari apa yang selama ini disampaikan di dalam kegiatan sosialisasi tersebut, ini *kan* kita melihat bahwa sebetulnya penting pengembangan dan sosialisasi

daripada geospasial terutama dalam aplikasinya pada berbagai macam hal dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pemerintahan maupun dan sebagainya.

Saya mendapati misalkan pada beberapa hal kita bisa memberikan solusi terhadap batas-batas daerah, desa itu Pak kalau di kampung-kampung bisa ribut Pak, gara-gara misalkan sungainya geser dia, gara-gara banjir yang sebelumnya bergeser beberapa ratus meter itu bisa terjadi, Pak. *Nah* memang maka diperlukan ini satu batas-batas yang, yang apa digital, tetapi memang itu valid *nah* itu peran daripada BIG.

*Nah* oleh karena itu kami meminta Pak, untuk kegiatan sosialisasi BIG ini tetap dilakukan di daerah-daerah sehingga kemudian masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Dan kami juga melihat strategis daripada posisi BIG ini gimana, kalau kita lihat dari IG-nya Pak Aris ini *kan* sering diajak ketemu dengan petinggi-petinggi negara ini, ini *kan* artinya beliau ini BIG ini dianggap penting Pak oleh para petinggi-petinggi negara kita. *Nah* oleh karena itu saya pikir penting itu bukan hanya ke atas tapi juga ke bawah sehingga semua bisa merasakan manfaat BIG itu secara aktual.

Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan, pantunnya apa yah?

*"Pulau Irian Burung Cendrawasih, Cukup Sekian dan Terima Kasih"*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk semua.

#### **(PERGANTIAN KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih Pak Bambang Patijaya, saya menggantikan Pak Ketua yang mendadak dipanggil ke Markas Besar di Gondangdia, silakan Ibu Ratna lanjutkan.

**F-PKB (Hj.RATNA JUWITA SARI, SE, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi VII;  
Yang saya banggakan Kepala BAPETEN, Kepala BIG beserta dengan jajarannya;  
Juga TA-TA kami segenap Sekretariat.

Terima kasih atas pemaparannya Bapak-Bapak, Bapak-Bapak saja ya Ibunya di belakang. Salam kenal juga dari kami, karena Kepala BAPETEN baru, Kepala BIG juga baru, semoga dengan pergantian Kepemimpinan ini bisa memperkuat lembaga ke depannya begitu.

Yang ingin kami tanyakan Pak, yang pertama untuk BIG ya, sebelumnya terima kasih juga karena BIG ini Pimpinan, setiap sosialisasi selalu memberikan oleh-oleh untuk kami yaitu peta desa dan kecamatan yang ada di daerah pemilihan, ada di Kabupaten Tuban sementara ini. Hal tersebut sangatlah menyentuh tentu saja karena jangankan perangkat desa Pak, saya tanya ke pemerintah kabupaten saja itu beliau tidak tahu apa itu BIG, Badan Informasi dan Geospasial itu mereka tidak tahu. Sehingga bisa dirasakan yah distorsi dari otorisasi pemerintahan yang ada di Indonesia itu sedemikian jauhnya begitu, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini mungkin perlu lah ditambahkan frekuensinya begitu Pimpinan, sehingga seluruh Indonesia sampai ke level terbawah yaitu di pemerintahan desa itu mengenal adanya Badan Informasi dan spasial, Badan Informasi dan Geospasial, mohon maaf.

Yang kami tanyakan disini adalah kita tahu ya bahwa hari ini setiap kita ngomong itu harus berdasarkan data begitu, data ini menjadi barang yang sangat vital dan membuat segala proses pengambilan keputusan maupun kebijakan itu bermula, dan ini adalah termasuk barang mahal yang ada di Indonesia. Jadi kalau ini termasuk barang yang mahal di Indonesia, sedangkan pengajuan anggaran dari Badan Informasi Geospasial itu masih segini-gini aja, saya menjadi tanda tanya besar, apakah memang BIG ini masih nyaman di zonanya yang begini-begini saja ataukah memang belum ada sebuah keberanian untuk melakukan ekspansi yang lebih besar untuk menjaga satu peta Indonesia yang seperti sering disampaikan oleh Bapak Presiden.

Kita ngomong sekarang ini *kan* sudah Revolusi Industri di 5.0 *gitu* yah, tadi saya baca di halaman 6 ada layanan data center JIGN yang dimuarakan untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan pada tahun lalu saya juga masih sangat ingat ada salah satu seminar yang BIG memberikan *statement* disitu, tapi saya lupa yang memberikan *statement* siapa, bahwa saat kita ingin menghadapi Revolusi Industri 5.0 ini kita membutuhkan konektivitas yang lebih dekat antar wilayah, sementara kita tahu bahwa basis data yang ada di Indonesia ini banyak sekali dan belum sinergi satu sama lain.

Kesadaran berdata yang kita miliki juga masih sangat lemah, oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Badan Informasi Geospasial apakah pengembangan untuk data antar wilayah ini sudah bisa disinergikan akhirnya oleh BIG atau belum? Dan apabila hal ini berjalan dengan lamban, mohon maaf menurut saya BIG lah yang punya tanggung jawab terbesar di dalamnya begitu, sehingga kami mohon mungkin ada langkah-langkah khusus yang telah dipersiapkan BIG untuk merespon tantangan ini.

Yang berikutnya, tadi saya menyambung pertanyaan dari Koko saya Pak Bambang Patijaya, beliau menanyakan terkait pergeseran batas wilayah di desa yang ini memang sangat sensitif begitu ya kalau misalnya di tingkat wilayah begitu, kira-kira ada *nggak* ya peran dari perangkat-perangkat lokal, karena kita tahu belum banyak memang desa itu yang memiliki peta secara fisik, apalagi kok digital, fisik saja mereka banyak yang belum punya *gitu* loh, apalagi digital, walaupun misalnya ada dokumen-dokumen lama yang mereka miliki apakah itu nanti akan di akomodir oleh BIG dalam penyelesaian perselisihan batas wilayah antar desa? Sejauh mana nilai-nilai yang direspon,

apakah itu juga mengambil *local wisdom* yang ada di daerah masing-masing atau bagaimana diputuskannya?

Yang terakhir kepada BAPETEN betul tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami bahwa kerinduan atas banyaknya LPNK yang ada di sini itu sedikit terobati lah dengan kehadiran BAPETEN dan BIG ini, sehingga saya tadi meskipun ada acara saya sempatkan untuk hadir begitu Pimpinan, meskipun katanya Pak Bambang justru ini yang selamat begitu, kayanya *nggak* ada di atas, aman.

BAPETEN hari ini sudah menjadi sebuah, kalau menurut saya ya kalau kita ngomong energi baru dan energi terbarukan itu BAPETEN justru menjadi *rising star* karena betul BATAN sudah tidak kelihatan *gitu*, BATAN mau apa itu sudah tidak kelihatan sama sekali, kita yang misalnya ada *in charge* dengan urusan nuklir-nuklir *gitu* justru larinya malah langsung ke BAPETEN, betul, pemeran utama katanya.

*Nah* terkait dengan anggaran mungkin sedikit saya menyoroti Bapak, bisa dijelaskan sedikit *gitu* yah, kalau ini *kan* sudah semester pertama ya, tapi anggarannya, serapannya masih belum maksimal kalau menurut pemahaman kami, apakah ini bisa mendapatkan garansi nanti sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sudah bisa terserap sepenuhnya atau bagaimana, dan mungkin apa saja kendala yang dihadapi begitu, kalau serapannya masih belum maksimal Pak, terus terang kalau misalnya minta tambah anggaran juga kita mikir-mikir Pak, segini saja tidak bisa ngabisin apalagi nanti ditambah *gitu kan*.

Gayanya begitu gayanya, tapi prinsipnya sama bahwa kami juga berharap BAPETEN sebuah lembaga yang sangat *powerfull* ini juga diberikan keberpihakan dari sisi anggaran *gitu*, sehingga jangan nanggung-nanggung Pak kalau mau minta tambah *gitu*, kaya tadi BIG saya lihat nambahnya cuman sedikit juga kalau tidak salah cuman hampir 20 miliar ada *nggak* ya? Segitu ya Pak? Malah diturunin, malah diturunin.

Iya lah mungkin hal-hal semacam ini saya ingat banget, saya sering menyampaikan kepada para mitra kalau memang pagu indikatifnya turun mumpung ketemu sama kami usulannya berapa supaya kami juga bisa bantu untuk menaikkan *gitu* loh, lah kalau Bapak dikasih Pagu Indikatif segitu sudah *oke-oke* saja, lah kami mau menaikkan bagaimana begitu *kan*, jadi kasihlah kami *reasoning*, kasih kami data apa-apa saja yang bisa diperkuat supaya Bapak anggarannya bisa ditambah.

Terkait BAPETEN kita tahu yah bahwa nuklir sebagai energi terbarukan ini, eh sebagai energi baru, salah satu energi baru ini sangat terbuka begitu, apalagi kami di Komisi VII juga beberapa kali sudah studi banding begitu, mendapatkan pencerahan dari banyak negara yang hari ini menggunakan nuklir sebagai salah satu energi pembangkit utama yang ada di negara-negara mereka, seperti Rusia atau kemarin kita juga ke Hungari dan ada beberapa negara Eropa yang lain yang masih memilih nuklir sebagai salah satu energi andalan.

*Nah* apabila Pak, apabila nantinya Indonesia mampu mengimplementasikan nuklir sebagai sumber energi utama, kita tahu hari ini PLN juga sudah mulai bergerak kesana begitu *kan*, kira-kira langkah BAPETEN terkait penerapan adanya *powerplan* nuklir di Indonesia itu seperti apa? Apakah sudah berdasarkan riset, termasuk standar *provement technology*, sistemnya, strukturnya, komponennya, sampai dengan *savety*-nya bagaimana begitu? Kalau misalnya sudah, itu juga akan menjadi sebuah nilai tambah begitu lah untuk kita bersama-sama berjuang menaikkan akselerasi transisi energi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja Pimpinan, yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, kami akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Ibu Ratna Juwita. Jadi begini Bapak-Bapak, ini mumpung ada kesempatannya tadi disampaikan oleh Ibu Ratna, jarang-jarang Pak kalau kita bisa justru kita mendorong supaya ada kenaikan pagu anggaran Pak, dan ini kebetulan Banggar Pak, betul, nanti yang berjuang untuk Bapak-Bapak disana ya Ibu Ratna salah satunya *gitu*, jadi ya ini mumpung, ini apa namanya sebuah usulan menurut saya sangat produktif, dan ini menunjukkan komitmen kita Pak, Komisi VII kepada program-program Bapak nanti di tahun 2024 ke depannya.

Begitu Pak, mohon dipertimbangkan ulang, *nah* tapi begini intinya sekarang ini kita sudah sampai dalam tahapan sudah berakhir dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan, saya persilakan Bapak-Bapak untuk bisa memberikan jawaban, singkat saja Pak, nanti sisanya bisa, bisa disampaikan secara tertulis. Ya kami persilakan Pak.

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Terima kasih, Pimpinan. Secara umum kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada kami, terutama untuk mempersiapkan PLTN pertama di Indonesia, ini memang menjadi tantangan kita bersama, kami ucapkan terima kasih.

Yang tadi Bapak/Ibu sampaikan bahwa kami akan pro aktif untuk sosialisasi, jadi kami sudah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi ini memang lebih dari tahun 2023 ini, untuk Pak Bambang, untuk Babel, khusus untuk Babel kami berencana minggu depan Bapak, akan ke Bangka Belitung dan sudah akan bertemu dengan gubernur, kami sampaikan karena saat ini adalah PT Torcon yang tadi mengajukan itu adalah memang *basic*-nya awalnya torcon itu *Torium Consortium*, jadi memang *basic*-nya itu adalah menggunakan torium dicampur dengan uranium untuk bahan bakarnya.

*Nah* mereka mengajukan untuk membangun atau menguji coba itu di Pulau Glasa di Babel, mungkin Bapak tahu Klasa atau Glasa itu di sana, *nah*

ini jika mereka menggunakan di sana Pemda (Pemerintah Daerah) harus mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan, jadi salah satunya merubah RT/RW-nya, kemudian juga infrastruktur-infrastruktur yang lainnya, *nah* besok kami akan sampaikan kepada pemda juga jajaran-jajaran yang ada disana, juga kami mengundang pihak-pihak terkait Bappenas dan juga dari DEN akan hadir di sana, Pak.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Iya interaktif izin, Pimpinan. Terkait dengan ini memang menarik Pak, karena begini, ini informasi A1 Pak ya.

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Iya.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Saya masih bingung Pak dengan yang namanya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Torium itu, dan pada akhirnya ada seorang teman bertemu dengan Pimpinan Torcon USA-nya, dia sering mengatakan ini masih dalam tahap riset, maksud saya ini jangan menjadi satu sesuatu yang pada akhirnya apa hanya gimik-gimik saja, gimik-gimik aja menghabiskan waktu energi tetapi *no result* seperti itu, silakan saja di, di apa namanya disikapi tetapi tolong jelaskan ke saya di mana di dunia ini pada saat ini PLTN Torium yang sudah beroperasi secara komersil?

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Belum ada, Pak.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Belum ada, jadi saran saya jangan habiskan energi, jangan habiskan Bapak punya anggaran untuk hal-hal yang tidak jelas, karena kalau sudah ada, ya *nggak* ada masalah, kalau belum berarti Indonesia menjadi tempat kelinci percobaan.

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Oke terima kasih Pak Bambang, jadi terakhir kami setelah tadi mohon diskusi dengan mereka, sudah dilakukan konsultasi ke kami, kesatunya rekomendasi kami adalah untuk torium itu menjadi pilihan terakhir bagi mereka, dan mereka sudah mengajukan yang baru hanya menggunakan uranium Bapak, jadi saya kira sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan.

Oke terima kasih, untuk selanjutnya kami juga mendukung karena menjadi tim dari sisi pemerintah untuk RUU EBET dan kami juga kemarin oleh Ibu Andi, kami diperintahkan oleh Ibu Andi untuk selalu hadir di dalam rapat-rapat pembahasan EBET dengan ESDM, karena sebelumnya kami tidak ikut hadir Pak, *alhamdulillah* kami sudah hadir akan mengawal hal-hal terkait dengan PLTN tersebut.

Kemudian untuk, PLTN untuk *(suara tidak jelas 01.41.05)* secara infrastruktur, kami saat ini sudah membuat *roadmap* untuk pengawasan, itu kita samakan dengan *roadmap* yang ada di ESDM, Bappenas, juga DEN, dan juga sudah masuk ke RPJPN, itu sistem pengawasan kami, dan juga telah memiliki kerjasama selain dengan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) juga dengan beberapa negara, yaitu kami sudah ada MoU dengan Kanada, dengan Amerika, kemudian juga dengan Korea, dan Jepang, kemudian negara-negara lain yang sudah kami hubungi juga ada Rusia dan juga Spanyol.

Intinya gini, bahwa saat ini pengawasan PLTN itu banyak pihak yang akan ikut terlibat, jadi jika salah satu PLTN itu berkasus di salah satu negara maka akan menjadi tanggung jawab internasional, itu yang perlu kita tidak bisa bermain-main istilahnya, itu kuncinya Ibu. Kemudian yang kedua internasional juga akan memberikan bantuan, itu kami juga dalam beberapa perjanjian sudah kami miliki, mereka akan memberikan bantuan dalam bentuk *expert* maupun kalau kita minta bisa dalam bentuk bantuan yang lainnya, itu juga sudah menjadi *(suara tidak jelas 01.42.29)*.

Kemudian informasi yang terbaru, kami juga menjadi anggota NHSI (*Nuclear Harmonization and Standardization Initiative for SMR*, itu yang diinisiasi oleh IAEA anggota kami, kami adalah Indonesia hanya satu-satunya anggota di negara ASEAN, jadi hanya Indonesia yang di, diundang ke sana.

*Nah* penentuan ini adalah khusus untuk SMR untuk menentukan ada 2 *track*, *track* pengawasan juga *track industrial*, di mana *track* pengawasan akan membuat sistem pengawasan khusus untuk SMR, sedangkan untuk yang konvensional kami sudah memiliki. Pengawasan yang digunakan oleh konvensional dianggap akan terlalu ketat karena besar, sehingga perlu ada standar yang baru, *nah* ini kami perkirakan tahun 2024 itu selesai, jadi saat ini kami sedang menyusun bersama-sama dengan negara-negara pihak atau negara-negara lain di dalam anggota NHSI tersebut.

Kemudian yang *track* yang berikutnya adalah *track* industri yang disebut, industri itu akan menetapkan standar generik untuk komponen-komponen di dalam penggunaan PLTN itu sehingga diharapkan PLTN itu punya standar keselamatan yang baik dan bagus, tetapi nilai ekonomisnya rendah, maksudnya harganya turun karena tidak khusus oleh, untuk perhatian tertentu saja.

Dan Bapak, tadi juga Bapak-Bapak menyatakan apakah kami juga menginspeksi *smelter* jadi secara umum sebetulnya untuk tambang dan non tambang ini selain BAPETEN ada ESDM, kemudian juga ada LH, juga ada pihak-pihak lain, khusus untuk kami sudah mengadakan koordinasi dengan LH dan ESDM khusus jika ada di indikasi ada di dalam prosesnya itu terakumulasi generatif maka itu izin dari BAPETEN.

Saat ini untuk monasit dan hasil tambang yang lainnya jika ada indikasi radioaktif maka kami itu di, mempunyai ketentuan yang disebut dengan MIR (*Material Ikutan Radioaktif*), itu sudah, sudah kami awasi dan beberapa lokasi di Bangka Belitung itu sudah memiliki izin dari kami, akhirnya kami berikan izin kemudian standar-standar keselamatan juga sudah, sudah terpenuhi dan juga kami melakukan inspeksi, cuma Bapak, masalah isinya apakah nanti akan

digunakan untuk yang lainnya, apakah akan diambil dan sebagainya bukan domain kami, mungkin nanti bisa kami tanyakan dengan ESDM dan sebagainya itu rencana ke depannya seperti apa. Jadi tugas kami hanya memastikan bahwa MIR (Material Ikutan Radioaktif) tersebut itu disimpan di tempat yang aman, itu tugas kami.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Iya izin interaktif Pimpinan, karena begini Pak Sugeng, ini *kan* ada beberapa kasus ini *tailing-tailing* dari Bangka Belitung dikirim keluar dari Bangka Belitung atas nama Sircon Lowgrade katanya, padahal *tailing* dan kita tahu pokoknya itu pasti akan dilakukan proses purifikasi, dan hasilnya sudah pasti di antaranya ada monasit, pasti itu, *nah* ini yang ingin kami tanyakan *gitu* loh, apakah kemudian mereka ini beberapa pengolahan-pengolahan yang ada di Kalimantan misalnya, ini apakah juga dipantau tentang monasitnya? Kami ingin tanya juga apakah di Kalimantan ketika menambang sircon dan sebagainya juga mengandung monasit?

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Iya.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Mengandung *kan*, *nah* itu kami perlu tahu apakah selama di Kalimantan juga melakukan pengawasan Pak.

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Siap Pak, **di kalimantan** belum ada penyimpanan, tapi kami akan cek Pak, pastikan, terima kasih Pak atas informasinya.

Dan untuk Bapak-Bapak selanjutnya, tadi Pak Hendrik, Pak Hendrik terima kasih Pak Hendrik kami siap kalau Bapak-Bapak, nanti kami untuk sosialisasi jadwal berikutnya tim kami akan berkoordinasi dengan TA Bapak/Ibu sekalian. Ada beberapa yang sudah, sudah *confirm* tanggalnya dan juga waktu, alokasi dan sebagainya.

Kemudian untuk PNBP Bapak, kami memiliki PNBP di tahun 2023 ini, targetnya sekitar hanya 15M dan saat ini sudah terealisasi 10M, jadi di bulan kelima ini sudah 10M, kami perkirakan mungkin kami akan menerima sekitar 18-20, *nah* kelebihan jika diizinkan oleh Kementerian Keuangan kami akan pergunakan untuk tambahan karena melebihi target dari, dari yang direncanakan.

Kami tidak memiliki BLU, jadi BAPETEN hanya menerima PNBP karena yang pertama untuk syarat menjadi BLU kami tidak terpenuhi, dari sisi nilai kemudian independensi BLU itu sendiri itu juga tidak terpenuhi.

Realisasi kami 40% saat ini atau 41% saat ini sebetulnya sudah sesuai bahkan melebihi target yang kami rencanakan, biasanya begini Bu anu, Bu

Roro maupun Bu Ratna, jadi kita itu biasanya di TW 1 (Triwulan 1) itu 20-20 berikutnya 30-30, apakah ini ideal atau tidak? Ini adalah pengalaman bertahun-tahun trendnya seperti itu, jadi biasa di TW 1 dan TW 2 itu belum, belum hangat *gitu* dan juga kenapa di TW 1 dan juga realisasi belum bisa maksimal 50%? Karena banyak pengadaan itu yang bisa, yang dimulai TW 2 tetapi pelaksanaannya ada di TW 3 maupun TW 4, jadi wajar jika 40% di semester pertama kemudian 60% di semester keduanya, jadi betul ini masih, masih wajar kami anggapnya.

Kendala tentu ada tapi saat ini kami sudah berkoordinasi, kami juga memohon konsultasi oleh BPKP, oleh intern pemerintah, ini sebagai pendampingan kami sebelum diperiksa oleh BPK kami juga secara *real time* itu bisa berkonsultasi dengan BPKP, dan *alhamdulillah* kami tidak banyak kendala yang kami hadapi, kebanyakan kendalanya adalah pergeseran alokasi anggaran, sebagai contoh awalnya kami itu seandainya ada infrastruktur yang, yang tidak dialokasikan untuk diperbaiki ternyata rusak *gitu*, kami membutuhkan dana besar kita relokasikan, dan itu bisa di, diatasi bersama-sama dengan koordinasi.

Dan Bapak, ada juga tentang, tadi tentang kisi-kisi RUU yang Ibu tanyakan tadi, itu memang ada beberapa hal yang, yang baru sensasinya adalah yang pengaturan tentang kepemilikan, jadi saat ini itu kalau, kalau saat ini kita mirip kaya *anu*, maunya di undang-undang yang baru itu memiliki itu juga sudah harus, harus diketahui atau mendapatkan izin, jadi *nggak* boleh seseorang itu hanya memiliki bahan nuklir tetapi tidak digunakan.

Saat ini itu kami hanya bisa harus digunakan itu baru terkena, terkena sanksi atau kewajiban-kewajiban, tetapi kalau hanya memiliki itu belum di undang-undang yang lama, *nah* di undang-undang yang baru salah satunya nanti tentang hak kepemilikan itu agar diatur.

Kemudian yang kedua adalah peran antara pemerintah, BUMN, dan swasta juga akan di, dipertegas di dalam undang-undang yang baru ini, mungkin secara rinci nanti Ibu akan kami, kami sampaikan, kami resumekan apa saja yang baru dan yang lama nanti kami kirim ke Ibu, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kalau garis besarnya sudah nanti bisa tertulis Pak sisanya.

**KEPALA BAPETEN (SUGENG SUMBARJO):**

Oke, mungkin itu saja Bapak, mungkin yang lainnya nanti kami sampaikan secara tertulis, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, terima kasih, lalu silakan Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial) juga secara garis besar saja Pak, silakan.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Komisi VII dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat.

Saya mulai dari Pak Hendrik, terima kasih Pak untuk dukungannya selama ini, apakah ada bakti inovasi lagi, sebetulnya di BIG selain terkait dengan batas desa Pak, tema bakti inovasi kami juga tentang pemetaan kebencanaan dan atlas nasional serta atlas taktual ini untuk yang penyandang Tuna Netra.

Dan kami memang butuh dorongan dari Komisi VII juga karena selama ini memang penganggaran untuk pemetaan kebencanaan dan atlas taktual ini masih sangat minim, dan beberapa kali memang kita terkena pemotongan anggaran di Kementerian Keuangan termasuk *automatic adjustment*, jadi mengapa anggaran kita kecil? Sebetulnya kita juga *nggak* ingin kecil-kecil amat Pak, karena namanya saja BIG Pak, cuma *size*-nya yang belum BIG ini, kepalanya juga tidak BIG-BIG amat soalnya, *nah* itu.

Ini yang pertama Pak Hendrik jadi kami akan berlanjut, kemudian juga Ibu Roro terima kasih Ibu atas berbagai masukannya, untuk pemetaan desa ini sebetulnya kita sudah berlangsung lama dan saat ini kalau secara kartu matriks seluruh Indonesia selesai tugas kami untuk melakukan delineasi, hanya kartu matriks ini *kan* perlu ada kesepakatan di darat antar 2 desa, *nah* itu kami bisa memfasilitasi bersama-sama dengan kabupaten, karena nanti SK batas itu di kabupaten, kami mendorong terus ini di setiap kabupaten, sehingga kalau Pak Bambang tadi ngelihat IG saya ke mana-mana karena dalam rangka itu Pak, biar Bupati itu ayo toh dibuat SK-nya, ayo dibuat SK-nya biar lebih bagus.

Dan tentu ya kalau ditanya apakah kita mencukupi untuk yang pemetaan batas desa ini sampai sekarang belum, sekali lagi karena kami harus membagi anggaran dengan berbagai prioritas yang lain, nanti mungkin saya akan menjelaskan kebutuhan anggaran juga.

Kemudian masih terkait dengan Ibu Roro kaitan dengan kebijakan satu peta, dulu kita sukses Ibu, 85 peta tematik di kementerian lembaga, peta macam-macam itu di kementerian, itu misalnya peta mangrove, peta garam, peta hutan, peta transportasi, peta jalan, peta kebencanaan dan lain sebagainya itu kita sudah mengkompilasi, mensinkronisasi 85 peta tematik di Perpres Tahun 2016, kemudian sekarang di Perpres Nomor 23 Tahun 2021 ini kita ditambah Bu, 158 tematik dari 24 kementerian, termasuk nanti kebencanaan, perubahan iklim, keuangan, ekonomi dan lain sebagainya.

Dan ini kita baru tahap kompilasi, artinya dari seluruh peta itu kita bisa ngindikasikan tumpang tindihnya, kita tahu sekian puluh juta hektar yang tumpang tindih itu karena dari hasil kita *one map policy*, saya sepakat dengan Ibu nanti sebetulnya ini secara digital dan bisa diakses Bu di *website* kita, setiap kementerian lembaga maupun pemerintah ya tinggal ngambil saja datanya, karena datanya sudah terstandarisasi semua dengan itu.

Kemudian juga yang ketiga terkait dengan realisasi anggaran seperti dengan BAPETEN tadi Ibu Roro, sebetulnya kalau secara pelaksanaan program kita sudah berjalan, hanya memang ada beberapa pekerjaan yang pembayarannya di akhir nanti, dan sehingga belum bisa kita masukan laporannya, sehingga makanya kita baru 30 sampai 40%, misalnya kalau pembangunan stasiun pasang surut dan pembangunan InaCORS itu kita tidak boleh bayar Pak kalau bangunan belum jadi, nanti kita kena juga, dan sekarang mereka baru proses membangun, jadi kalau itunya sudah dihitung ya kita mungkin 40% lebih yah, cuma karena duit kita belum keluar ke mereka kita belum bisa ngitung.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan penurunan anggaran, ya sebetulnya penurunan anggaran itu karena PHLN Bu, Bapak/Ibu sekalian, jadi ada dana PHLN yang sekarang sudah selesai, sehingga mau tidak mau itu menjadi turun.

Kemudian berikutnya dari Pak Willy, terima kasih Pak, ini saya senang dan saya terima kasih Pak Willy selalu memberi, memberikan dorongan secara moral kepada kita dari pertama kali Pak, terkait dengan berbagai kebijakan termasuk kebijakan untuk nanti *online single submissions* ya, Pak Willy dan Bapak/Ibu sekalian sekarang kita sedang mengerjakan yang pemetaan 1:5.000 Pak, kalau itu bisa sebetulnya itulah kuncinya untuk RDTR dan itu bagian untuk yang perizinan secara *online* tadi.

Jadi nanti akan memberikan dampak yang luas termasuk ini kita didorong sekaligus saya juga menginformasikan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi VII saat ini memang kita sedang minta juga penambahan dari Kementerian Keuangan, karena kalau 1:5.000 itu kita kerjakan dengan anggaran BIG yang sekarang ini Pak, mungkin kita harus selesai puluhan tahun Pak, sangat tidak mungkin, tidak realistis, sehingga kita menggunakan berbagai skema, salah satunya adalah kerjasama dengan BUMN agar BUMN berkenan mau untuk membantu kita melakukan pemetaan, swasta itu sebenarnya banyak Pak yang pingin, cuma karena ini data itu kedaulatan kita termasuk data penting karena informasi geospasial dasar selalu kita tahan dulu Pak.

BUMN mau masuk berdasarkan peraturan yang baru, perpres, sehingga kita baru proses, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan kita sudah mau MoU dengan BUMN. Sambil menunggu BUMN sekarang kita baru minta Kementerian Keuangan untuk menambah, mudah-mudahan di pagu realisasi 2024 bisa nambah Pak, karena kalau *nggak* kita tidak bisa jalan, nanti kami akan menginformasikan ke Bapak lagi.

Kemudian untuk Pak Bambang Patijaya, terima kasih Pak dorongan yang selama ini diberikan kepada kita termasuk hal strategis yang Bapak ungkit dan sampaikan tadi bahwa batas desa ini penting, apakah kita punya batas-batas digitalnya? Iya, kita punya, sekali lagi Pak, kalau 1:5.000 selesai sebetulnya batas desa itu termasuk di dalamnya Pak, jadi kita tidak akan kerja dua kali dan kita akan dorong itu untuk bisa selesai.

Kemudian Ibu Ratna, iya tentunya kalau ada dokumen dari desa itu menjadi basis kita untuk kita gunakan, sekali lagi itu beberapa tambahan nanti

masukannya detailnya Bapak Pimpinan akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih, waktu saya kembalikan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas jawaban yang disampaikan.

**F-PKS (H.NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.):**

Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak.

**F-PKS (H.NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.):**

Nyambung ini Pak, ini saya di halaman 6 ini layanan data center satu data Indonesia akses informasi, bisa dicontoh tidak ditampilkan, kaya apa sih makhluknya itu, barangnya itu? Supaya kita ini menikmati juga Pak.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Mohon izin Pak, segera disiapkan Pak.

**F-PKS (H.NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.):**

Iya, biar kita diskusi panjang bisa menikmati contohnya begitu. Sambil jalan Pak, ini *kan* prosesnya masih panjang ya untuk bisa data ini secara komprehensif dan terintegrasi, tapi tentu tidak menunggu komprehensif yah, karena tuntutan kita juga, yang sudah terakses data walaupun terus *update* ya, itu bisa ditampilkan tentunya *kan*, seperti kaya gini, ini lagi ramai ekspor pasir, pasir laut, ini nyambung saja ngobrol, ini apakah akan mengganggu atau stabilitas pasang surut air laut dalam batas negara ini sejauh mana bisa mempengaruhi itu? Ini *kan* juga pasang surut laut turut menentukan batas negara dinamikanya, sambil ini kita pengen tahu juga, terima kasih itu Pak.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Mohon izin Bapak Pimpinan interaktif. Terima kasih Bapak Nurhadi Anggota Komisi VII, pertama Pak, sebetulnya BIG ini juga melakukan perekaman dasar laut Pak, jadi seluruh dasar laut itu kita petakan, sehingga kita sebetulnya bisa juga menurunkan data itu untuk mengetahui sedimen dasar laut pada beberapa tempat, atau juga kebalikannya kita gunakan untuk *monitoring* sedimen yang diambil sehingga akan terjadi perubahan dasar laut.

Implikasinya sebetulnya bisa saja merubah garis pantai pada beberapa hal karena terjadi erosi pantai, tapi ini *kan* belum terbukti sehingga sekali lagi kegiatan kami terkait dengan batimetri pengukuran dasar laut yang sebetulnya kita gunakan untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan tambahan landas kontinen kita, kami laporkan Pak, tahun kemarin kita nambah landas kontinen di Sumatera

itu seluas Pulau Madura Pak di dasar lautnya, itu karena pemetaan batimetri kita, *nah* kalau nanti dari sedimen mau diambil itu sebetulnya data batimetri kita bisa mendukung, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apakah data yang sudah tersaji itu harus menunggu seluruhnya komprehensif? Tidak Bapak, jadi data itu sudah kami tampilkan di dalam satu data kita, contohnya misalnya yang baru tampil ini adalah kita punya peta skala besar sampai dengan skala menengah.

Dan untuk daerah-daerah yang sudah ada langsung bisa diakses, termasuk tadi misalnya kita mau melihat garis pantai, termasuk kita mau melihat jumlah pulau di tempat kita, semuanya bisa diakses Pak, bahkan kementerian dan lembaga sekarang lalu lintasnya juga sudah lancar disitu, hanya memang tidak seluruh peta itu kita yang punya Pak, karena peta itu yang punya kementerian masing-masing karena tematik, yang kita yang peta dasar Pak, yang rupa bumi itu memang kita yang ada garis pantainya, yang ada jalannya, yang ada bangunannya, yang ada tutupan lahannya, yang ada vegetasinya kita, tapi kalau sudah ngomong mangrove, sudah ngomong hutan, sudah ngomong garam, sudah ngomong jalur transportasi itu masing-masing Kementerian, tetapi data itu mesti disetor ke kita Pak.

Dan kita akan evaluasi data ini *compatible nggak*, tadi disampaikan oleh Bu Roro dan Bu Ratna kalau *layer-layernya nggak* bisa ditumpang susun berarti *nggak* bisa, *nah* itu tugas kita untuk memastikan bahwa mereka standarnya sama sehingga kalau mau ini ditumpang lagi, ditumpang lagi kelihatan apanya itu kita bisa miringkan, dan itu data yang luar biasa besar saya sepakat Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi begini Pak, kalau boleh saya ini mohon izin teman-teman Anggota, jadi karena Bapak juga melakukan pendataan dan pemetaan terhadap dasar laut ya termasuk di situ mengenai sedimentasi pasir, jadi ini sangat relevan dengan dikeluarkannya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengerukan sedimentasi pasir yang juga bisa dipergunakan untuk berbagai hal terkait pembangunan infrastruktur dan lainnya termasuk ekspor *gitu* ya Pak, kita juga sudah melakukan diskusi yang panjang dengan Kementerian ESDM terkait hal ini, dan saya kira BIG dalam, dalam konteks ini memiliki peran yang cukup besar untuk menentukan apakah, satu sedimentasi tersebut mengandung mineral atau tidak.

Kedua sejauh mana itu masih masuk kategori sedimentasi, dan di mana terjadi sedimentasi di mana titik-titik itulah yang kemudian menjadi acuan untuk dilakukan pengerukan sedimentasi pasir ke depannya, jadi saya kira ini penting bagi, bagi BIG, jadi BIG ini punya peran yang harus dilaksanakan secara proaktif untuk menentukan, apa namanya melakukan pendataan dan kajian terhadap sedimentasi pasir ini, dan menurut saya ini sangat penting Pak, itu.

Jadi ini mungkin saya kira menjadi perhatian kita juga, dan kami juga minta nanti dalam rapat dengar pendapat berikutnya dengan BIG mohon maaf Mas, jadi dalam rapat dengar pendapat berikutnya dengan BIG kita minta nanti

ada satu pemaparan terkait hal ini Pak, terkait masalah pengkajian terhadap kajian terhadap pendataan dan sedimentasi pasir Pak, saya kira penting itu Pak.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Terima kasih Bapak Pimpinan, hal ini memang sebetulnya ada beberapa hal yang terkait dengan kami Pak, terutama kami itu melakukan pemetaan morfologi yang dasar lautnya, namun demikian memang ada beberapa yang diluar Tusi kami yaitu misalnya apakah sedimen itu bisa diambil atau sedimen itu mengandung apa memang di luar kami, tetapi bahwa untuk memotret morfologi dasar lautnya kami berperan, sehingga kami bisa misalnya sedimen setelah diambil itu morfologinya jadi seperti apa, apakah terjadi perubahan lereng itu mempengaruhi potensi misalnya longsor apa namanya lereng lautan dan lain sebagainya, itu kami bisa masuk Pak.

Dan kami siap nanti kalau di pertemuan berikutnya memang kami akan memaparkan kaitannya dengan batimetri untuk hal ini, dan kami memang butuh dorongan juga bantuan dari Bapak/Ibu sekalian dukungan untuk terutama pemetaan batimetri yang kami lakukan sampai saat ini *kan* tidak bisa seluruh Indonesia atau *covered* presentasinya belum banyak Pak, karena sekali lagi kami harus, kami itu punya 12 Eselon II Bapak/Ibu, dan anggaran kita hanya 400 sehingga harus kita bagi ke setiap pekerjaan, tapi kalau ada *request* peta dasarnya harus maju, batimetrinya harus maju, peta dasarnya harus maju memang banyak sekali harus kami kerjakan.

Mohon izin menambahkan yang di layar ini Palangkaraya Bapak Willy, sekaligus tadi merespon Pak Willy kita sudah punya data detail di sana, dan ini produk kita Pak, jadi ini kita yang membuat, kita mimpi kita ini seluruh Indonesia, sehingga google pun bisa kerjasama dengan kita memakai data kita, sebetulnya kalau kita merasa Google itu bagus dalam hal informasi kalau presisi *nggak* Pak, jadi kita tidak bisa menggunakan Google untuk basis kita misalnya *engineering*, sangat tidak sesuai, kalau karena dia tidak presisi sama sekali.

*Nah* kita ingin menciptakan itu 1 yang 5.000 agar seluruh Indonesia kita presisi, mungkin beberapa kota besar kita sudah punya, tahun ini kami dimandatkan Pak untuk IKN selesai, jadi kalau Bapak/Ibu ke IKN yang digunakan untuk tempat *selfie* pilar biru itu kami yang buat Pak, jadi itu memang tidak muncul di sana sekonyong-konyong, jadi memang itu harus kita ukur bahkan dari pasang surut laut di Balikpapan itu kita tarik sehingga ada data itu, dan titik nol itu yang digunakan sekarang kalau kita mau membangun tower, membangun bangunan, menentukan nolnya nol apa sih, jadi orang tidak bingung nolnya nol apa, nolnya ya dari pilar kami.

Sekarang kami membuat lagi 5 pilar yang seperti itu di sekitarnya untuk mempermudah kontrol, bukan untuk tempat *selfie* sebetulnya Pak, tapi untuk mempermudah kontrol cuma kemudian dipakai untuk tempat *selfie*, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik Pak, itu Palangkaraya Pak ya? Ini foto Palangkaraya, itu rumahnya Pak Willy dengan atap putihnya itu ya Pak, Pak Willy besar sekali rumahnya kita boleh diundang sekali-kali ke sana Pak Willy.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Izin Pak Ketua, kalau boleh menanyakan kembali, jadi tadi *kan* disampaikan berkaitan mengenai bahwa nanti bisa kerjasama dengan google *gitu ya, nah* ketika kita berbicara mengenai kerjasama dengan Google itu apakah nanti kemudian ada batasannya juga? Karena kalau misalnya kita ibaratnya data yang milik Indonesia *gitu ya*, yang mungkin sifatnya itu juga hanya untuk negara kita mengetahui data yang cukup penting itu misalnya dari segi sumber daya alam kita, kekayaan alam kita itu di wilayah mana saja

*Nah* itu apakah selama ini saya tidak tahu justru *gitu*, apakah selama ini itu ada semacam limit gitu loh, *as to* data apa yang boleh kita *share* dengan negara luar, iya *kan* dengan luar negeri dan data yang memang hanya diperuntukan untuk kepentingan dalam negeri kita dan ini *kan* ibaratnya sesuatu hal yang belum tentu kita mempunyai maksud untuk agar negara lain mengetahui *gitu kan, nah* itu apakah selama ini ada standarisasi seperti itu? Agar kita menjaga juga *gitu ya* dari segi apa sih itu namanya ya, ya itu sih.

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Izin menjawab Bapak, sebelum saya menjawab itu Ibu Roro, satu ilustrasi, saat ini kalau kita membuat dokumen tata ruang di setiap kabupaten kota apalagi dokumen rencana detail tata ruang yang itu untuk kebutuhan investasi, karena sekarang *kan* kita investasi perizinan harus lewat satu sistem dan itu salah satu dasarnya adalah tata ruang, tata ruang basisnya peta.

Kalau setiap tata ruang itu mereka harus membuat peta sendiri, itu alokasi untuk satu RDTR bisa sampai 2 miliar, karena disitu termasuk harus membuat petanya, *nah* sekarang peta itu kita ambil alih sehingga setiap pemda atau Kementerian ATR ketika melakukan pemetaan tata ruang itu mesti anggarannya *kan* lebih kurang dari itu, hanya 1 miliar atau kurang dari 1 miliar efisiensi itu yang pertama, sehingga peta dasar ini penting.

Yang kedua, beberapa daerah di tempat kita maupun kementerian atau lembaga ketika dia mempunyai program dan terkait dengan informasi geospasial kaitannya untuk navigasi dan informasi larinya ke Google dan dia harus berlangganan ke Google, dan langganannya mahal misalnya sampai 20 miliar per bulan, ada beberapa kabupaten kota yang demikian, kalau kita sudah punya maka ada mekanisme antara kementerian lembaga bahwa data itu bisa saling dibagi pakai, walaupun berbayar mungkin jauh lebih murah, jadi efisiensinya akan di situ, itu keuntungan kita punya data skala besar tadi.

Yang ketiga sekarang dengan Googlenya, tentu Google akan senang karena dia tidak perlu melakukan pemetaan lagi, tapi kita hanya memberikan



khusus untuk yang navigasi ke Google yang selama ini dia gunakan, tapi kalau data masukannya yang sangat detail tentu *nggak*, karena itu untuk kepentingan kita di kementerian dan lembaga memang yang harus kita gunakan, terima kasih Bu.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik Ibu/Bapak, kalau tidak ada lagi kita bisa lanjut ke *draf* Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat kita Komisi VII DPR RI dengan Kepala BAPETEN dan Kepala BIG beserta jajarannya, Rabu Tanggal 7 Juni 2023:

1. Komisi VII DPR RI telah memahami penjelasan dan bersepakat dengan Kepala BAPETEN dan Kepala BIG terkait pagu indikatif BAPETEN dan BIG Tahun Anggaran 2024, masing-masing sebesar Rp126.780.235.000,- untuk BAPETEN dan Rp432.905.813.000,- untuk BIG dengan rincian sebagaimana ditampilkan di depan:
  1. BAPETEN program dukungan manajemen senilai Rp101.367.083.000,- program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp25.413.152.000,-.
  2. BIG program dukungan manajemen Rp171.046.536.000,- program penyelesaian informasi geospasial Rp261.859.277.000,-.

Bisa disepakati? Ibu/Bapak disepakati, ini sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu/Bapak di dalam BIG, silakan.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Izin Pimpinan, menambahkan saja kita ini kan dari tadi menawarkan sesuatu yang positif yah dalam bentuk kemitraan kita bagaimana kita juga mendukung program BAPETEN dan BIG, apakah perlu kita nyatakan dalam bentuk kesimpulan rapat tentang dukungan anggaran kita kepada mereka?

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Saya kira mungkin itu bisa disampaikan bagian daripada catatan rapat ini ya, jadi tidak dikunci di sini Pak, tapi ini disepakati *gitu* Pak, bisa ditambahkan?

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Itu artinya kita serius Pak mendukungnya jadi bukan hanya retorika saja Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi ini ya, jadi tadi komitmen kita Komisi VII, Komisi VII DPR RI, eh sebentar yang nomor 1 kita ketok dulu yah?

**(RAPAT: SETUJU)**



**(KETOK PALU 1 KALI)**

Nomor 2, Komisi VII DPR RI mendukung penambahan anggaran BAPETEN dan BIG Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan program-program kerja yang dibutuhkan, jadi silakan Pak kalau memang ingin diajukan lagi tambahannya disitu, kami akan mendukung penambahan tersebut, bisa disetujui Ibu/Bapak?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendorong Kepala BAPETEN untuk secara proaktif meningkatkan sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan tenaga nuklir kepada masyarakat luas khususnya penerapan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI mendukung peran vital BIG dalam penyediaan informasi geospasial secara akurat dalam rangka mendukung ketahanan dan kedaulatan wilayah RI, oleh karena itu Komisi VII DPR RI mendorong Kepala BIG untuk meningkatkan kegiatan bakti inovasi kepada masyarakat, misalnya terkait pemetaan batas wilayah desa, pemetaan daerah rawan bencana dan lain-lain, *nah* ini penting ini, setuju ya Bapak-Bapak?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Usul Bapak Pimpinan, terkait dengan dukungan tersebut selain untuk batas desa dan pemetaan kerawanan perlu di-*state* di situ seperti tadi saya sampaikan terkait dengan tema kita untuk atlas dan peta taktual, Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Apa Atlas?

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Atlas dan peta taktual.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, kita tambahkan ya.



**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Baru dan lain sebagainya.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kok ada peta tematik?

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Taktual Pak, untuk penyandang Tuna Netra, taktual, tak, t-a-k, tak.

Taktual itu peta untuk seperti huruf Braille Pak, jadi untuk penyandang Tuna Netra kita belum punya Pak, ini harus kita dorong karena mereka bisa merasakan memahami NKRI hanya dari situ Pak, bentuk Pulau Sumatera seperti apa, bentuk Pulau Jawa seperti apa bagi mereka sangat penting.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke ya jadi kita setuju tadi sudah diketok kita tambah lagi dengan adanya peta tematik atlas, peta taktual untuk penyandang disabilitas dan lain-lain, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Berikut, Komisi VII DPR RI mendorong BIG untuk meningkatkan kontribusi dalam pembuatan peta dasar laut dan sedimentasi laut, saya kira ini penting untuk fungsi pengawasan kita terkait masalah ini, setuju Ibu/Bapak?

**KEPALA BIG (MUH. ARIS MARFAI):**

Setuju.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, yang terakhir Komisi VII DPR RI meminta Kepala BAPETEN dan Kepala BIG untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat Tanggal 14 Juni 2014, setuju Pak yah?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, demikian telah kami akhiri rapat pada hari ini, mudah-mudahan akan bermanfaat ke depannya dan kami tentu memberi dukungan penuh kepada BAPETEN dan BIG dalam melaksanakan tugas-tugasnya ke depan khususnya dalam menghadapi tahun anggaran 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi VII DPR RI, kepada Kepala BAPETEN dan Kepala BIG beserta jajaran yang menghadiri rapat pada siang hari ini, dan kami tutup rapat ini dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilamin*, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.16 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002

